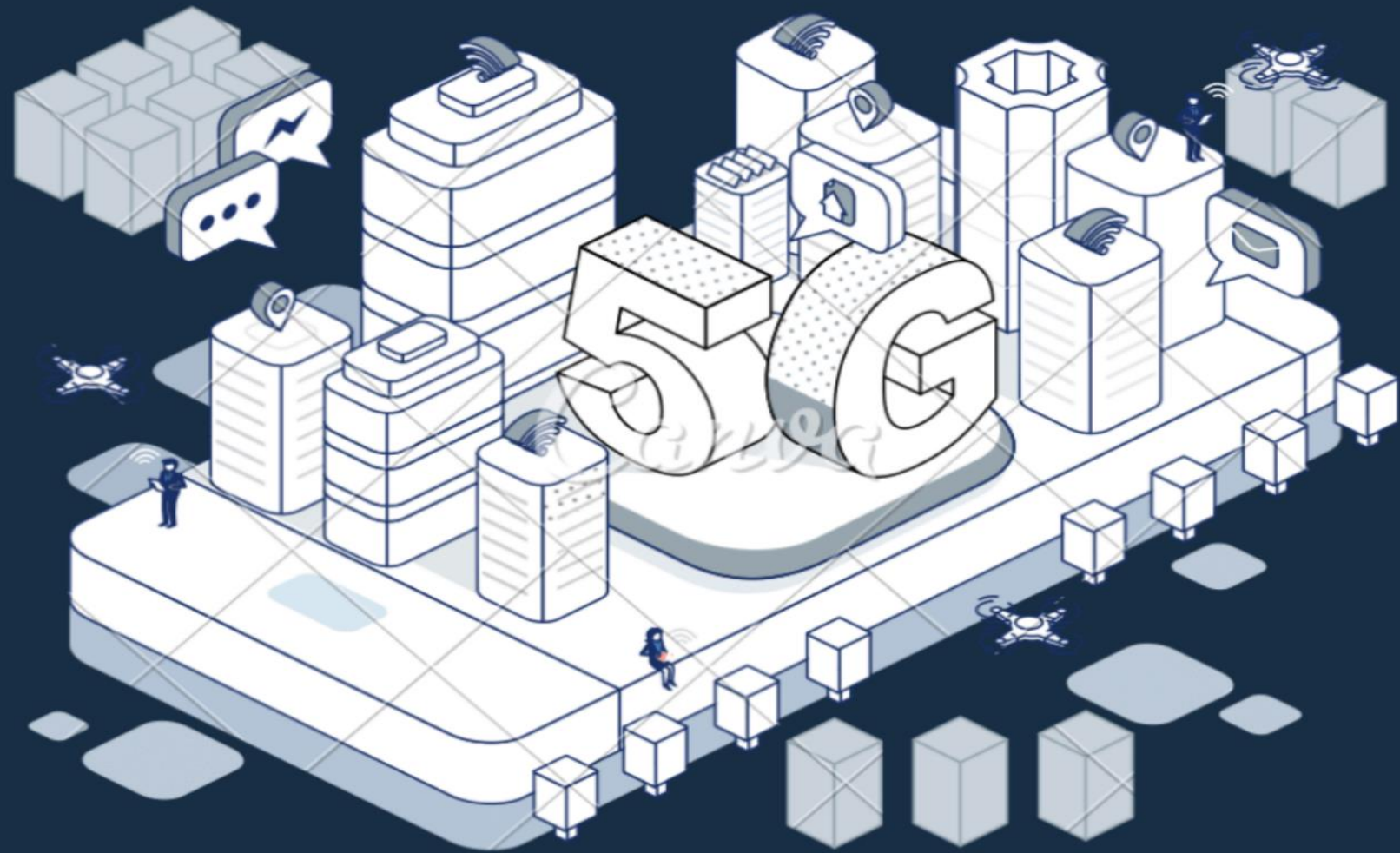


BUKU II

RENCANA INDUK SMART CITY KABUPATEN ACEH BARAT



KABUPATEN ACEH BARAT, 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Master Plan Smart City	2
1.3 Landasan Hukum.....	2
1.4 Kerangka Pikir Smart City	3
II. VISI <i>SMART CITY</i> KABUPATEN ACEH BARAT	6
2.1 Visi <i>Smart City</i> Kabupaten Aceh Barat.....	6
2.2 Misi Smart City Kabupaten Aceh Barat.....	6
2.3 Sasaran Dan Tujuan Smart City Kabupaten Aceh Barat	8
2.4 Hubungan Misi Pembangunan Kabupaten Aceh Barat dan Dimensi Smart City	21
III. STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY.....	22
3.1 Smart Governance.....	22
3.2 Smart Branding.....	30
3.3 Smart Economy	35
3.4 Smart Living	42
3.5 Smart Society.....	45
3.6 Smart Environment	49
IV. RENCANA AKSI SMART CITY	56
4.1 Pengembangan Kebijakan Dan Kelembagaan Smart City Kabupaten Aceh Barat.....	58
4.1.1 Kebijakan.....	58
4.1.2 Kelembagaan	62
4.2 Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City	65
4.3 Rencana Pengembangan Aplikasi Dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City	66
4.4 Rencana Penguatan Literasi Smart City Kabupaten Aceh Barat	70
4.5 Sinkronisasi Program RPJMD Dengan Program Kerja Inovasi Smart City	77
4.5.1 Smart Governance	77
4.5.2 Smart Branding.....	83
4.5.3 Smart Economy	85

4.5.4	Smart Living.....	89
4.5.5	Smart Society.....	93
4.5.6	Smart Environment.....	102
V.	Peta Jalan Pembangunan Smart City	104
5.1	Fase Program Jangka Pendek (Tahun 2021-2022)	105
5.2	Fase Program Jangka Menengah (2021-2026).....	106
5.3	Fase Program Jangka Panjang (2021-2031)	111
5.4	Quick Win	113
VI.	PENUTUP.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Landasan Hukum Smart City Kabupaten <i>Aceh Barat</i>	2
Tabel 2 1 Misi Smart City Kabupaten <i>Aceh Barat</i>	7
Tabel 2.2 Sasaran dan Tujuan Smart City Kabupaten <i>Aceh Barat</i>	8
Tabel 2.3 Hubungan Misi Pembangunan Kabupaten <i>Aceh Barat</i> dan Dimensi Smart City ..	21
Tabel 3.1 Analisis SWOT Dimensi Smart Governance	22
Tabel 3.2 Strategi Pembangunan Smart Governance	27
Tabel 3.3 Analisis SWOT Dimensi Smart Branding.....	30
Tabel 3.4 Strategi Pembangunan Smart Branding.....	33
Tabel 3.5 Analisis SWOT Dimensi Smart Economy	35
Tabel 3.6 Strategi Pembangunan Smart Economy	38
Tabel 3.7 Analisis SWOT Dimensi Smart Living.....	42
Tabel 3.8 Strategi Pembangunan Smart Living.....	43
Tabel 3.9 Analisis SWOT Dimensi Smart Society.....	45
Tabel 3.10 Strategi Pembangunan Smart Society	47
Tabel 3.11 Analisis SWOT Dimensi Smart Environment.....	49
Tabel 3.12 Strategi Pembangunan Smart Environment.....	53
Tabel 4.1 Rencana Aksi Pengembangan Kebijakan Smart City Kabupaten <i>Aceh Barat</i>	58
Tabel 4.2 Rencana Aksi Pengembangan Kelembagaan Smart City Kabupaten <i>Aceh Barat</i> .	63
Tabel 4.3 Infrastruktur Pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	65
Tabel 4.4 Rencana Aksi Pengembangan Aplikasi Pendukung.....	68
Tabel 4 5 Layanan Aplikasi Yang Digunakan pada OPD Kabupaten <i>Aceh Barat</i>	69
Tabel 4.6 Rencana Aksi Penguatan Literasi	70
Tabel 4.7 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Governance	77
Tabel 4.8 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Branding ...	83
Tabel 4.9 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Economy ...	85
Tabel 4.10 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Living	89
Tabel 4.11 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Society	93
Tabel 4.12 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Environment	102
Tabel 5 1 Fase Program Jangka Pendek (Tahun 2021-2022).....	105
Tabel 5.2 Fase Program Jangka Menengah (Tahun 2021-2025).....	107
Tabel 5.3 Fase Program Jangka Panjang (Tahun 2021-2031).....	111
Tabel 5.4 Kegiatan Quick Win Kabupaten <i>Aceh Barat</i>	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dimensi Smart City 4

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berbasis Kota Pintar (*Smart City*) saat ini menjadi sebuah trademark di seluruh dunia, begitu juga bagi pembangunan kota atau kabupaten di Indonesia. Pembangunan kota berbasis solusi *Smart City* juga dijadikan sebagai salah satu visi misi dan program kerja pada berbagai kota di Indonesia dan didokumentasikan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada setiap kota di Indonesia.

Kota Pintar ini juga diinisiasi oleh Kementerian Kominfo melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kantor Staf Presiden, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian PANRB. Kementerian Kominfo juga telah mencanangkan Gerakan Menuju 100 *Smart City* dimana Kabupaten *Aceh Barat* juga terdorong untuk melakukan akselerasi pembangunan dengan menggunakan konsep *Smart City* atau Kota Pintar. Dengan adanya pembangunan berbasis *Smart City*, maka terbukanya ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi dengan memanfaatkan teknologi dan pembangunan dengan pendekatan smart city sebagai *enabling* faktor.

Fenomena kota pintar juga tidak serta merta mengubah identitas sebuah Kota/Kabupaten yang telah terbentuk ratusan tahun sebelumnya. *Aceh Barat* dikenal sebagai wilayah pertanian, perkebunan dan sedang berkembang menjadi daerah wisata. Pembangunan berbasis smart city yang dilakukan dengan pendekatan enam dimensi sangat berpeluang untuk meningkatkan nilai dan mutu pembangunan kabupaten *Aceh Barat* dengan meningkatkan kemitraan antara stakeholder baik dari unsur pemerintah, pengusaha, akademik, industri, kelompok budaya dan pelaku usaha keratif. Melalui penyusunan rencana induk ini diharapkan mampu mempersiapkan dan mengimplementasikan pembangunan daerah berbasis konsep smart city dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal dan landasan syariah islam. Rencana induk *smart city* ini akan melakukan pemetaan terhadap potensi dan permasalahan, kesiapan infrastruktur, serta SDM yang dimiliki, sehingga

berkesinambungan dalam menjaga keseimbangan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan *Aceh Barat* dalam mengimplementasikan konsep pembangunan smart city.

1.2 Tujuan Master Plan Smart City

Adapun tujuan dari penyusunan *masterplan* ini adalah untuk menyusun perencanaan dan pengembangan Smart City Kabupaten *Aceh Barat* melalui pendekatan 6 (enam) dimensi yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society* dan *Smart Environment* secara sistematis, efektif, efisien, logis, kondisional, partisipatif dan realistis sesuai dengan kebutuhan Kabupaten *Aceh Barat* dalam jangka pendek, menengah dan panjang, sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemerintah *Aceh Barat* yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

1.3 Landasan Hukum

Terdapat beberapa kebijakan daerah yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun regulasi penyelenggaraan konsep *Smart City* di *Aceh Barat*, sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah tetap berkelanjutan dan ditampung dalam satu wadah.

Tabel 1.1 Landasan Hukum Smart City Kabupaten *Aceh Barat*

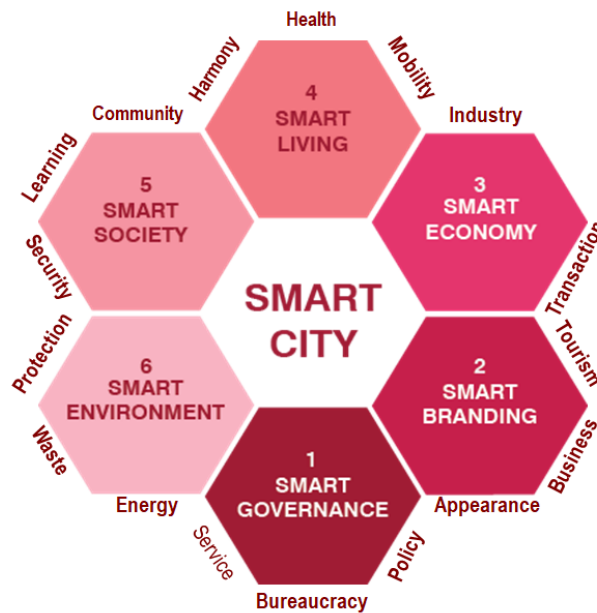
No	Tahun	Nomor	Tentang	Dimensi
1	2017	78	Peraturan Bupati tentang pedoman sistem informasi kampung dalam Kabupaten <i>Aceh Barat</i>	<i>Smart Society</i> <i>Smart Governance</i>
2	2019	28	Peraturan Bupati tentang rencana induk pengembangan e-government Kabupaten <i>Aceh Barat</i>	<i>Smart Governance</i>
3	2019	70	Peraturan Bupati tentang pedoman sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dilingkungan pemerintah Kabupaten <i>Aceh Barat</i>	<i>Smart Governance</i>

No	Tahun	Nomor	Tentang	Dimensi
4	2017	016/482/D ISKOMIN FO/2017	Surat Keputusan Bupati tentang nama domain/ sub domain dan surat elektronik pada satuan kerja perangkat Kabupaten <i>Aceh Barat</i>	<i>Smart Governance</i>
5	2019	480/24/DI SKOMINF O/2019	Surat Keputusan Bupati tentang penunjukan/ penetapan tim teknis pengelola website Kabupaten <i>Aceh Barat</i> tahun anggaran 2020	<i>Smart Governance</i> <i>Smart Society</i>
6	2019	489/372/D ISKOMIN FO/2019	Informasi dan Pelayanan Informasi (PPID) Kabupaten <i>Aceh Barat</i> tahun anggaran 2019	<i>Smart Branding</i> <i>Smart Governance</i> <i>Smart Society</i>
7	2019	070/519/D ISKOMIN FO/2019	Surat Keputusan Bupati tentang penunjukan/ penetapan komite, tim koordinasi, tim evaluasi dan tim teknik Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten <i>Aceh Barat</i>	<i>Smart Governance</i>
8	2019	188.4.45/2 8/HKM/20 19	Website jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten <i>Aceh Barat</i> tahun anggaran 2019	<i>Smart Governance</i>
9	2020	061/117/O RGS/2020	Pengelolaan pengaduan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat sistem pengelolaan pengadaan pelayanan publik nasional Kabupaten <i>Aceh Barat</i> tahun anggaran 2020	<i>Smart Society</i> <i>Smart Governance</i>

Sumber: JDIH Kabupaten *Aceh Barat*, 2020

1.4 Kerangka Pikir Smart City

Kota pintar merupakan sebuah cara untuk membentuk *Aceh Barat* menjadi sebuah kota yang layak huni dengan penyediaan fasilitas umum yang memadai agar mampu memberikan berbagai kemudahan dan meningkatkan kesejahteraan serta kenyamanan bagi Masyarakat *Aceh Barat*. Dengan identitas sebagai kota yang islami yang menjadikan sebuah keunikan dan nilai tambah sendiri bagi kabupaten *Aceh Barat*. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan pengembangan konsep *Smart City* di *Aceh Barat* haruslah diorientasikan dengan konsep pembangunan bersyariat.



Gambar 1 Dimensi Smart City

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Dimensi pembangunan *Smart City Aceh Barat* yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*. Masing-masing dimensi terdiri dari 3 sub pilar dimensi.

a. Smart Governance

Smart Governance merupakan dimensi pembangunan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan kabupaten *Aceh Barat* yang dilaksanakan secara pintar, sehingga *Smart Governance* dalam dimensi *Smart City* merupakan gambaran pemerintahan yang memberikan layanan publik yang efisien dan berkualitas kepada masyarakat, memantau pembangunan dan meningkatkan partisipasi warga dalam proses pembangunan. *Smart Governance* terdiri dari tiga sub pilar berikut:

1. *Public Service*, yaitu meningkatkan layanan publik
2. *Bureaucracy*, yaitu meningkatkan kinerja birokrasi
3. *Public Policy*, yaitu peningkatan efisiensi kebijakan publik

b. Smart Branding

Smart Branding merupakan dimensi pembangunan *Smart City* yang fokus dalam meningkatkan daya saing *Aceh Barat* dan memasarkan potensi kota dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Pemasaran potensi kabupaten *Aceh Barat* ini diharapkan dapat mendorong aktivitas perekonomian dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Smart Branding* terdiri dari tiga sub pilar berikut:

1. *Tourism*, yaitu membangun ekosistem pariwisata
2. *Business*, yaitu membangun daya saing bisnis (industri kreatif)
3. *Appearance*, yaitu penataan wajah daerah

c. Smart Economy

Smart Economy merupakan pembangunan tata kelola perekonomian yang mampu menghadapi tantangan dan adaptif terhadap perubahan sehingga terwujudnya ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah. Pada akhirnya diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat ditunjang secara efektif dan efisien serta berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Smart Economy* terdiri dari tiga sub pilar berikut:

1. *Industry*: penataan industri primer, sekunder dan tersier
2. *Welfare*: peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. *Transaction*: membangun ekosistem keuangan

d. Smart Living

Smart Living merupakan dimensi pembangunan tata kelola kelayakan taraf hidup masyarakat kabupaten *Aceh Barat* sehingga mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak, nyaman, dan efisien bagi masyarakat. *Smart Living* terdiri dari tiga sub pilar berikut:

1. *Harmony*, yaitu harmonisasi tata ruang dan lingkungan yang nyaman
2. *Health*, yaitu menjamin fasilitas dan pelayanan kesehatan
3. *Mobility*, yaitu membangun sarana transportasi dan logistic

e. Smart Society

Smart Society merupakan dimensi pembangunan tata kelola ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis, baik antar individu, antara individu dengan kelompok, ataupun antara kelompok dengan kelompok. Interaksi masyarakat diharapkan terjalin intensif sehingga membentuk sebuah tatanan yang produktif secara positif dengan digital literasi yang baik. *Smart Society* terdiri dari tiga sub pilar berikut:

1. *Community*, yaitu membangun masyarakat yang pintar
2. *Learning*, yaitu membangun sistem edukasi yang efisien
3. *Security*, yaitu menjamin keamanan dan keselamatan

f. *Smart Environment*

Smart Environment merupakan dimensi pembangunan tata kelola lingkungan yang pintar. Di mana pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat berorientasi pada lingkungan hidup, sehingga terwujud tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan. *Smart Environment* terdiri dari tiga sub pilar berikut:

1. *Protection*, yaitu perlindungan lingkungan
2. *Waste*, yaitu tata kelola sampah dan limbah
3. *Energy*, yaitu membangun tata kelola energi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan

II. VISI SMART CITY KABUPATEN ACEH BARAT

2.1 Visi Smart City Kabupaten Aceh Barat

Adapun Visi *Smart City* Kabupaten Aceh Barat adalah:

“Terwujudnya Daerah Yang Berdaya Saing Dan Inovatif Didukung Sinergi Masyarakat Damai, Sehat, Cerdas, Religius Dan Bermartabat Menuju Masyarakat Aceh Barat Adil Dan Sejahtera”.

2.2 Misi Smart City Kabupaten Aceh Barat

Agar pencapaian visi *Smart City* Kabupaten Aceh Barat tersebut dapat diwujudkan, maka disusunlah 6 (enam) misi yang dapat mendukung pelaksanaannya yaitu:

Tabel 2 1 Misi Smart City Kabupaten Aceh Barat

Misi	Misi Smart City Aceh Barat	Dimensi Smart City
Misi 1	Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, efisien, transparan, partisipatif dan komunikatif	<i>Smart Governance</i>
Misi 2	Mewujudkan <i>Aceh Barat</i> untuk berinovasi dengan menjadi pusat wisata alam yang cerdas dan berbudaya	<i>Smart Branding</i>
Misi 3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat	<i>Smart Economy</i>
Misi 4	Mewujudkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas untuk masyarakat yang sehat dan cerdas	<i>Smart Living</i>
Misi 5	Mewujudkan masyarakat saling kolaborasi untuk tetap berdaya saing damai	<i>Smart Society</i>
Misi 6	Mewujudkan daerah yang indah tetap sejuk serta berkelanjutan	<i>Smart Environment</i>

2.3 Sasaran Dan Tujuan Smart City Kabupaten Aceh Barat

Tabel 2.2 Sasaran dan Tujuan Smart City Kabupaten Aceh Barat

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR KEBERHASILAN			
Misi 1: Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang yang efektif, efisien, transparan, partisipatif dan komunikatif							
	1.1.	Pelayanan publik dan birokrasi yang efektif, efesien dan transparan	1.1.1	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis SPBE	1.1.1.1	Penyediaan dan peningkatan 3 domain penilaian Pemingkatan SPBE	Indeks SPBE
					1.1.1.2	Penyediaan SOP terkait pelayanan public	Persentase jumlah SOP terkait layanan Public
			1.1.2.	Menghadirkan sistem pelayanan publik yang lebih efektif, efisen, mudah dan berkualitas.	1.1.2.1	Meningkatkan pemanfaatan layanan secara elektronik sebagai media yang dapat diakses oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Integrasinya beberapa layanan publik - Indeks kepuasan masyarakat

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		INDIKATOR KEBERHASILAN
			1.1.3.	Menghasilkan kebijakan – kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.	1.1.3.1	Memberikan aksesibilitas publik yang partisipatif dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pengakses system open data - Jumlah program yang ditawarkan masyarakat dalam sistem musrembang
					1.1.3.2	Pengambilan keputusan berdasarkan data	Integrasi beberapa layanan aplikasi
Misi 2: Mewujudkan <i>Aceh Barat</i> terus berinovasi dengan menjadi pusat wisata alam yang cerdas dan berbudaya							
	2.1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	2.1.1	Meningkatnya pembangunan industri kreatif	2.1.1.1	Peningkatan pembangunan industri dan ekonomi kreatif	Persentase perkembangan industri dan ekonomi kreatif
			2.1.2	Meningkatnya neraca perdagangan	2.1.2.1	Peningkatan daya saing dan diversifikasi produk	Meningkatnya jumlah produk unggulan khas <i>Aceh Barat</i>
			2.1.3	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	2.1.3.1	Peningkatan jumlah investasi	Meningkatnya jumlah investor
					2.1.3.2	Penguatan destinasi wisata halal	Persentase kunjungan wisatawan

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		INDIKATOR KEBERHASILAN
	2.2	Meningkatkan kualitas informasi terkait wisata	2.2.1.	Menampilkan informasi positif tentang daerah dan wisata alam	2.2.1.1	Mengembangkan literasi digital di masyarakat	
					2.2.1.2	Pembuatan SOP tentang literasi digital terkait pariwisata	Tersedianya SOP terpadu terkait pariwisata
	2.3	Pengelolaan data wisatawan dan budget wisata	2.3.1.	Mendapatkan data yang akurat tentang pariwisata	2.3.1.1	Pemanfaatan teknologi informasi tentang pariwisata	Tersedianya layanan aplikasi pariwisata terpadu
			2.3.2.	Mendapat kolekting data terkait keluhan dan masukan terkait dengan pariwisata	2.3.2.1	Penerapan big data analytic untuk DSS	Tersedianya data terkait Parawisata
Misi 3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat							
	3.1.	Penguatan tatanan ekonomi di dalam ekosistem pelayanan, pengelolaan dan transaksi keuangan.	3.1.1.	Menguatkan kelompok usaha dan koperasi syariah	3.1.1.1	Integrasi layanan UMKM dan IKM dengan koperasi syariah, dan market place local	Persentase Peningkatan Debitur di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		INDIKATOR KEBERHASILAN
					3.1.1.2	Mengembangkan dan menguatkan lembaga/usaha ekonomi berbasis syariah yang dapat membantu pemodalannya UKM/IKM secara syariah	Peningkatan kualitas UKM/IKM
					3.1.1.3	Pembuatan dan Pengembangan produk hukum pendukung ekonomi Syariah.	Regulasi terkait Ekonomi Syariah
			3.1.2	Peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan dan pengelolaan pendapatan daerah.	3.1.2.1	Pemanfaatan Teknologi informasi dalam Sistem Perencanaan dan Pendataan Sumber Daya Ekonomi	Pertumbuhan PDRB
					3.1.2.2	Memaksimalkan sumber penerimaan, retribusi dan pajak daerah	Persentase peningkatan retribusi dan pajak daerah

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		INDIKATOR KEBERHASILAN
	3.2.	Terciptanya ekosistem industri pendukung Smart City.	3.2.1	Membangun ekonomi industri yang berdaya saing dengan memperkuat perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan daerah dan pengembangan usaha mikro.	3.2.1.1	Pemetaan dan penataan industri primer, skunder dan tersier dengan pemanfaatan teknologi informasi	Persentase pertumbuhan UKM/IKM
					3.2.1.2	Peningkatan peran UKM/IKM dan penataan pedagang kaki lima	Tata kelola UKM/IKM dan pedagang kaki lima

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		INDIKATOR KEBERHASILAN
			3.2.2	Membangun dan mengembangkan keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan, sebagai pendukung Smart city.	3.2.2.1	Integrasi antara industri primer (perikanan) dan (pertanian, kehutanan) dari kabupaten tetangga dengan industri sekunder pengepakan, branding dan lain-lain dan terelasi juga dengan sektor jasa (tersier) yang dapat membuka peluang kerja baru dari integrasi antar tipe industri tersebut.	Tersedianya system yang terintegrasi antar industri, kebutuhan dan permintaan
					3.2.2.2	Mewujudkan pengembangan sentra industri	Bertambahnya jumlah sentra industri
					3.2.2.3	Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang	Stabilisasi harga produk di pasaran
			3.2.3	Mendorong Pengembangan Kewirausahaan sebagai pendukung industri 4.0	3.2.3.1	Mendorong berkembangnya startup – startup digital.	Persentase pertumbuhan industri pendukung 4.01

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		INDIKATOR KEBERHASILAN
			3.2.4	Meningkatkan jumlah Investasi.	3.2.4.1	Peningkatan potensi daerah melalui promosi dan kerjasama investasi dengan berbagai pihak	Jumlah investor & Nilai Investasi
	3.3.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3.3.1	Pengembangan dan Peningkatan kualitas daripada BUMG dan UMKM	3.3.1.1	Menumbuh kembangkan UKM, IKM dan industri kreatif seperti program OVOP	Tingkat Pengangguran Terbuka & Angka Kemiskinan
					3.3.1.2	Penyaluran modal usaha berdasarkan prinsip Syariah	Peningkatan persentase penyaluran modal usaha berdasarkan prinsip syariah
					3.3.1.3	Penyediaan Lapangan Kerja dan lapangan Usaha sesuai dengan potensi Gampong	Berkurangnya persentase pengangguran
					3.3.1.4	Memberikan bantuan tepat sasaran	Berkurangnya masyarakat miskin

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR KEBERHASILAN			
Misi 4: Mewujudkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan masyarakat yang sehat dan cerdas							
	4.1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	4.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	4.1.1.1	Optimalisasi jaminan kesehatan dengan integrasi sistem jaminan kesehatan di seluruh puskesmas dan rumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Kesehatan - Terintegrasinya layanan kesehatan terpadu
					4.1.1.2	Melaksanakan program Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Peningkatan persentase area KTR
					4.1.1.3	Peningkatan kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat	Persentase perbaikan gizi masyarakat
	4.2.	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan public	4.2.1.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan layanan public lainnya	4.2.1.1	Penguatan fasilitas kesehatan	Pembangunan fasilitas kesehatan yang ramah anak

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		INDIKATOR KEBERHASILAN
					4.2.1.2	Integrasi layanan puskesmas, rumah sakit dengan sistem kependudukan dan lainnya yang dianggap perlu	Mendaftar di puskesmas dan rumah sakit cukup dengan ktp dan pengambilan no secara online
	4.3.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	4.3.1.	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	4.3.1.1	Peningkatan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Berkurangnya PMKS
			4.3.2.	Meningkatnya kesejahteraan disabilitas	4.3.2.1	Pemenuhan kebutuhan kaum difabel	Bertambahnya lapangan kerja bagi kaum difabel
					4.3.2.2	lembaga kesejahteraan sosial	Jumlah bantuan bagi PMKS dan Difabel
	4.4.	Gampong Sehat	4.4.1.	Terwujudnya kesehatan bagi masyarakat dengan indikator umur harapan hidup lebih tinggi, rendahnya angka kematian dan kesakitan	4.4.1.1	Menguatkan Program KTR	Peningkatan persentase area KTR

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		INDIKATOR KEBERHASILAN
					4.4.1.2 .	Pembangunan IPAL komunal hanya pada kawasan permukiman dan tempat ibadah.	Bertambahnya jumlah IPAL komunal
	4.5.	Meningkatkan kualitas pendidikan	4.5.1.	Meningkatkan mutu tenaga pendidik	4.5.1.1 .	Meningkatkan kedisiplinan tenaga pendidik berbasis TIK	Tersedianya system e-disiplin untuk tenaga pendidik
			4.5.2.	Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses belajar mengajar	4.5.1.2 .	Penerapan Teknologi Informasi	- Jumlah pengakses layanan e-learning
Misi 5: Mewujudkan masyarakat saling kolaborasi untuk tetap berdaya saing dan damai							
	5.1.	Peningkatan pelayanan public dan monitoring	5.1.1	Memudahkan memonitor aktivitas kota	5.1.1.1 .	Command Center	- Durasi (cepat tanggap) tindakan atas laporan kejadian
Misi 6: Mewujudkan daerah yang indah tetap sejuk serta berkelanjutan.							

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		INDIKATOR KEBERHASILAN
	6.1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan dan berkesinambungan	6.1.1.	Meningkatkan pelayanan terkait dengan tata kelola sumber daya air, tanah, ruang terbuka hijau dan udara yang berkelanjutan.	6.1.1.1	Pemanfaatan teknologi GIS dan IOT	- Tersedianya layanan berbasis spasial Terpasangnya perangkat teknologi IOT terkait lingkungan dan Alam
			6.1.2.	Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan persampahan dan pengolahan limbah dan industri rumah tangga secara aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.	6.1.2.1	Pengembangan dan penguatan Sistem <i>Waste Collecting Point</i> (WCP)	- Peningkatan depo WCP di tiap-tiap gampong
					6.1.2.2	Pengembangan industri Pengelolaan sampah	Berkembangnya industri pengolahan sampah

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		INDIKATOR KEBERHASILAN
					6.1.2.3 .	Peningkatan pengelolaan sampah menjadi energi dan pemanfaatan untuk industri kreatif	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan sampah untuk energi - Peningkatan Industri kreatif menggunakan barang bekas
			6.1.1.	Peningkatan ruang terbuka yang ramah anak	6.1.1.1	Pengembangan dan pembangunan taman rekreasi di pusat Kota	
					6.1.1.2 .	Pengelolaan dan pengendalian dalam memelihara kondisi taman	
					6.1.1.3 .	Sinkronisasi Antara Perencanaan Pembangunan dengan kebutuhan ruang terbuka hijau, jalur sepeda dan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis lingkungan	

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		INDIKATOR KEBERHASILAN
	6.2	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi yang ramah lingkungan	6.2.1.	Meningkatkan penggunaan energi yang ramah lingkungan.	6.2.1.1 .	Pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan	
			6.2.2.	Meningkatkan Efisiensi energi	6.2.2.1 .	Pengembangan green building	

2.4 Hubungan Misi Pembangunan Kabupaten Aceh Barat dan Dimensi Smart City

Tabel 2.3 Hubungan Misi Pembangunan Kabupaten Aceh Barat dan Dimensi Smart City

MISI SMART CITY		MISI RPJMD 2017-2022	
Misi 1	Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, efisien, transparan, partisipatif dan komunikatif	Misi 6	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih
Misi 2	Mewujudkan Aceh Barat untuk berinovasi dengan menjadi pusat wisata alam yang cerdas dan berbudaya	Misi 3	Mewujudkan percepatan pembangunan kampung yang mandiri
Misi 3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat	Misi 1	Mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing
		Misi 8	Mewujudkan ketahanan pangan
Misi 4	Mewujudkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas untuk masyarakat yang sehat dan cerdas	Misi 4	Mewujudkan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan
Misi 5	Mewujudkan masyarakat saling kolaborasi untuk tetap berdaya saing damai	Misi 2	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter
		Misi 7	Mewujudkan kedamaian, kecerdasan spiritual dan keshalehan masyarakat
Misi 6	Mewujudkan daerah yang indah tetap sejuk serta berkelanjutan	Misi 5	Mewujudkan pelestarian adat istiadat dan lingkungan hidup

III. STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY

3.1 Smart Governance

Pemetaan strategi pembangunan Smart City dengan fokus pada dimensi Smart Governance melibatkan penggunaan metodologi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats). Dalam proses ini, kita akan menganalisis dan mengevaluasi kekuatan (Strengths) yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Barat dalam pengelolaan tata kelola smart city, kelemahan (Weaknesses) yang perlu ditingkatkan, peluang (Opportunities) yang dapat dimanfaatkan, dan ancaman (Threats) yang harus dihadapi. Di bawah ini, kami merinci hasil pemetaan strategi menggunakan pendekatan SWOT untuk dimensi Smart Governance:

Tabel 3.1 Analisis SWOT Dimensi Smart Governance

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	Kekuatan 1. Memiliki program unggulan Aceh Barat yaitu Penyelenggaraan Pengawasan dan perumusan kebijakan	Kelemahan 1. Kurangnya pendidikan substantif Auditor atau PPUPD untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas.

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<p>Faktor Eksternal</p>	<p>pendampingan Asistensi dalam hal tata kelola pemerintahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memiliki relasi yang baik antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) di tingkat Kabupaten Kota, Provinsi dan Pusat (Inspektorat, BPKP dan BPK-RI) 3. Tersedianya Peraturan Bupati tentang Administrasi Kependudukan 4. Tersedianya SDM yang memadai dalam Bidang Teknologi Informasi 5. Memiliki Aset Penting berupa Fasilitas sarana dan prasarana cukup memadai 6. Memiliki kewenangan dalam mengawasi Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM, Yayasan dan Forum. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kurang tersedianya kendaraan Roda 4 untuk membantu Mobilitas APIP 3. Belum optimalnya sosialisasi tentang Administrasi Kependudukan; 4. Perubahan regulasi sebagai pedoman yang berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan data kependudukan pada Sistem Informasi Kependudukan Terpusat; 5. Masih kurang memadainya perangkat Teknologi Informasi yang mendukung pelaksanaan Pelayanan Publik; 6. Jumlah sumber daya yang terbatas disebabkan oleh penghapusan tenaga honorer; 7. Masih Kurang tersedianya Blanko KTP dari pemerintah pusat 8. Mutasi pegawai yang tidak didasarkan kepada unsur kebutuhan, kompetensi, dan masa kerja 9. Basis data organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Rumah Ibadah belum terkomputerisasi
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keinginan yang kuat dari berbagai pihak untuk mendukung sistem administrasi Kependudukan yang mudah diakses secara luas; 	<p>Strategi Peluang dan Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan RTP (rencana tindak pengendalian) Inspektorat Aceh Barat untuk melancarkan Program pengawasan berbasis risiko; 2. Menjalin Relasi yang baik sesama APIP Inspektorat Aceh 	<p>Strategi Kelemahan dan Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah porsi anggaran pelatihan substantif untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas setiap JFA dengan jumlah pembelajaran minimal 200 jam per tahun;

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<p>2. Adanya Program pengawasan Berbasis Risiko untuk mempermudah Inspektorat dalam menentukan Target Pengawasan;</p> <p>3. Adanya program peningkatan kapasitas dan kapabilitas JFA selama 200 jam per tahun;</p> <p>4. Adanya dukungan Anggaran dari Pemerintah daerah dan Pusat;</p> <p>5. Adanya dukungan Pemerintah berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri;</p> <p>6. Tersedianya berbagai ajang kompetisi yang menilai layanan publik sebagai bagian dari upaya peningkatan motivasi bagi institusi dalam meningkatkan kinerja.</p>	<p>Barat dalam melakukan pelatihan;</p> <p>3. Menyediakan fitur unggulan untuk memudahkan masyarakat menerima layanan (Meghubungkan fitur notifikasi aplikasi dengan platform pesan instans seperti whatsapp);</p> <p>4. Menyediakan Fasilitas yang lebih memadai dari segi layanan Teknologi Informasi;</p> <p>5. Memberikan dukungan melalui peningkatan kapasitas untuk petugas layanan;</p> <p>6. Mengadakan kegiatan yang melibatkan seluruh Ormas, LSM, Yayasan dan Forum yang ada di Kabupaten Aceh Barat sehingga dapat bekerja sama dengan baik untuk menampung aspirasi-aspirasi Masyarakat.</p>	<p>2. Mendiskusikan Permen No.33 Tahun 2019 dengan pihak pemegang anggaran guna memastikan bahwa Permen tersebut terlaksana sepenuhnya, serta terpenuhinya fasilitas untuk peningkatan mobilitas pelaksana APIP dalam melaksanakan tugas berupa kendaraan roda 4;</p> <p>3. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi seperti media sosial dalam mensosialisasikan program;</p> <p>4. Mengalokasikan anggaran untuk mensosialisasikan Identitas Kependudukan Digital sebagai pengganti dokumen kependudukan konvensional, seperti KTP;</p> <p>5. Melakukan pendekatan khusus dan sosialisasi akan pentingnya data Ormas, LSM, Yayasan dan Rumah Ibadah yang harus dilaporkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Stigma negatif masyarakat terhadap inspektorat yang masih menganggap bahwa inspektorat merupakan Lembaga yang melakukan tindak yang merugikan masyarakat; 2. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan dan Akta Catatan Sipil; 3. Keadaan ekonomi masyarakat yang cenderung rendah; 4. Masih adanya oknum (Calo) yang mengambil keuntungan dari masyarakat dalam proses administrasi kependudukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat regulasi yang jelas mengenai mutasi di kalangan JFA; 2. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat tentang capaian yang diperoleh Lembaga Inspektorat; 3. Menyediakan posko pelayanan khusus pada setiap Kecamatan; 4. Menciptakan Inovasi layanan yang membantu masyarakat; 5. Disediakkannya program edukasi sebagai upaya mendekatkan inspektorat dengan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan formasi tambahan untuk JFA dan PPUPD yang diseleksi dengan baik sehingga mendapatkan JFA dan PPUPD yang terbaik; 2. Melakukan mediasi dan diskusi dengan Pihak Pengelola Keuangan Daerah agar segera melaksanakan Permen no 33 tahun 2019; 3. Menyediakan aplikasi/layanan pelayanan online untuk masyarakat; 4. Mengedukasi masyarakat agar menghindari jasa calo.

Smart Governance dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip tata kelola *Smart City* yang mencakup koordinasi dan integrasi dalam perencanaan dan pengendalian pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola SPBE dari tingkat kabupaten hingga tingkat gampong di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, serta membangun fondasi yang mendukung semua aspek *Smart City*.

Smart Governance dilaksanakan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan mematuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Efektivitas: Memaksimalkan penggunaan sumber daya yang mendukung SPBE sesuai dengan kebutuhan.
2. Keterpaduan: Mengintegrasikan sumber daya yang mendukung SPBE.
3. Kestinambungan: Melaksanakan SPBE secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan sesuai perkembangannya.
4. Efisiensi: Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang mendukung SPBE dengan cara yang tepat.
5. Akuntabilitas: Menyediakan kejelasan mengenai fungsi dan pertanggungjawaban pelaksanaan SPBE.
6. Interoperabilitas: Mendorong koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis serta antar sistem elektronik untuk pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
7. Keamanan: Menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan informasi, infrastruktur SPBE, serta aplikasi SPBE."

Smart Governance di Kabupaten Aceh Barat akan difokuskan pada tiga area utama dan delapan indikator berikut:

1. Pelayanan Publik:
 - a. Layanan Administrasi Masyarakat: Memberikan layanan administratif kepada masyarakat melalui proses yang efektif, efisien, dan ramah masyarakat.
 - b. Layanan Informasi Publik: Memberikan kemudahan akses terhadap informasi pemerintah yang penting bagi masyarakat, termasuk data publik, kebijakan, dan berita penting.
 - c. Layanan Sosial Masyarakat: Meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan dukungan lainnya untuk memenuhi kebutuhan beragam masyarakat.

2. Manajemen Birokrasi yang Efisien:

- a. Akuntabilitas Tata Kelola E-Birokrasi: Memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan di dalam tata kelola pemerintahan berbasis elektronik didasarkan pada prinsip akuntabilitas, termasuk pelaporan yang transparan dan pertanggungjawaban yang jelas.
- b. Transparansi dalam Pemerintahan: Membangun tingkat keterbukaan dan akses informasi yang tinggi untuk memungkinkan partisipasi publik, mendukung perencanaan yang lebih baik, dan meminimalkan risiko korupsi.
- c. Implementasi E-Government: Mendorong integrasi teknologi informasi dalam berbagai aspek pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, menyederhanakan proses, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

3. Manajemen Kebijakan Publik:

- a. Partisipasi dalam Perencanaan Publik: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga.
- b. Akses Informasi Publik: Memberikan akses yang mudah dan luas kepada informasi publik yang relevan, termasuk data, rencana, dan kebijakan pemerintah, sehingga masyarakat memiliki informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan.

Tabel 3.2 Strategi Pembangunan Smart Governance

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Public Service</i>	Peningkatan kualitas layanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan dengan OPD dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat 2. Integrasi layanan terutama <i>government to citizen</i> dan <i>government to business</i> serta juga <i>government to government</i> dan <i>government to employee</i> untuk meningkatkan kinerja ASN serta menuju ke Satu Data 3. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 4. Pengembangan aplikasi publik yang <i>user friendly</i> 5. Tata kelola sistem pertanahan melalui Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
<i>Bureaucracy</i>	Indeks SPBE	Penerapan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Aceh Barat
	Peningkatan kualitas pengawasan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko 2. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Asistensi dibidang Pengawasan 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 4. Penataan Administrasi Pemerintahan
	Meningkatkan penataan dan kinerja ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Promosi ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Aceh Barat 2. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah menuju smart City
	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Aceh Barat	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian menuju Smart City
	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Mengembangkan sistem pembayaran/transaksi non tunai di lingkungan SKPK
<i>Public Policy</i>	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berpolitik, menggunakan hak berorganisasi dan menggunakan hak pilih	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
	Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat dalam	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
	menghadapi berbagai ancaman.	Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	Meningkatkan Belanja Pemerintah Daerah	Mengembangkan sistem pembayaran/penyetoran PAD secara non tunai di lingkungan Kabupaten Aceh Barat

3.2 Smart Branding

Tabel 3.3 Analisis SWOT Dimensi *Smart Branding*

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat qanun dalam pembangunan sektor wisata Kabupaten Aceh Barat 2. Perkembangan desa wisata berada pada dalam trend positif 3. Aksesibilitas menuju tempat wisata cenderung sudah baik 4. Pelayanan masyarakat sudah berbasis aplikasi seperti OOS, SiCantik, SIMBG, Klik n Kring, SiLOPer, dll 5. Sudah memiliki beberapa staf dengan tingkat pendidikan tinggi 6. Memiliki beberapa tempat wisata dan tempat olahraga 7. Aceh barat memiliki padang rumput yang bisa mendukung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (SDM) rata-rata pegawai masih rendah 2. Tempat penyimpanan (Cold Storage) belum tersedia untuk menampung kelebihan suplai pada masa panen 3. Fasilitas rata-rata gedung, sarana dan prasarana masih belum memadai 4. Sumber Daya Alam utama Aceh Barat batubara, belum digarap secara optimal 5. Tenaga Ahli IT masih belum memadai 6. Cakupan Internet belum merata 7. Koordinasi antar instansi pemerintah Aceh Barat masih kurang kondusif 8. Kedisiplinan ASN yang kurang baik.

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Eksternal	<p>industri peternakan dalam skala besar</p> <p>8. Perkembangan usaha mikro dikalangan ibu rumah tangga berjalan positif</p> <p>9. Pertumbuhan Ekonomi Aceh Barat berada dalam trend yang positif</p> <p>10. Sektor perkebunan adalah penyumbang terbesar realisasi investasi di Aceh Barat setelah sektor pertambangan.</p>	
Peluang	Strategi Peluang dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Peluang
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memungkinkan untuk melakukan kerja sama dengan institusi pendidikan baik lokal maupun nasional 2. Adanya peluang investasi dari investor nasional maupun internasional 3. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat untuk pengembangan sektor pariwisata Aceh Barat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kerjasama dengan institusi Pendidikan dalam mengembangkan sektor pariwisata 2. Memanfaatkan segala bentuk dukungan anggaran dari provinsi maupun pusat untuk pengembangan sektor pariwisata 3. Berpartisipasi secara berkala dalam ajang promosi daerah untuk menggaet investor terutama di sektor perkebunan dan pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan segala bentuk Kerjasama dengan institusi Pendidikan dalam untuk peningkatan sumber daya ASN 2. Penindakan terhadap investor/perusahaan yang belum menggarap tambang batubara secara maksimal

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pertanian masih banyak didatangkan dari luar daerah 2. Masih banyaknya tengkulak yang menjadi perantara pengumpul hasil berbagai komoditas 3. Adanya pungutan liar di tempat-tempat wisata Adanya intervensi pihak luar dalam setiap pelaksanaan kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan lahan terlantar untuk pengembangan penanaman holtikultur untuk memenuhi kebutuhan daerah 2. Mengembangkan koperasi tingkat Gampong/Desa untuk dapat berpartisipasi dalam pengumpulan hasil komoditas masing-masing 3. Berpartisipasi dalam peninjauan investasi dalam bidang perkebunan dan pertanian baik tingkat nasional maupun internasional 4. Membina dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan di setiap desa yang berdekatan dengan lokasi wisata guna meminimalisir terjadinya pungutan liar di tempat wisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan Cold Storage dengan kapasitas yang dapat menampung hasil komoditi daerah, sehingga bisa mengurangi impor dari daerah lain 2. Memperkuat hubungan antar lini di setiap instansi pemerintah kabupaten Aceh Barat untuk mengurangi intervensi pihak luar dalam setiap kegiatan pemerintah

Dimensi kedua dalam konsep *Smart City* adalah *Smart Branding*, yang mencakup upaya membranding daerah dengan cerdas. *Smart Branding* mengacu pada inovasi dalam pemasaran daerah yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah. Ini dicapai dengan mengembangkan tiga elemen utama: pariwisata, bisnis, dan penampilan kota. Sasaran utama dari *Smart Branding* adalah meningkatkan daya saing daerah dengan cara memperbaiki tampilan kota dan memasarkan potensi daerah, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Strategi utama dalam mencapai *Smart Branding* adalah dengan memahami konsep *Smart City Branding*, yang mencakup peningkatan daya saing daerah melalui sektor pariwisata, bisnis, dan penampilan kota. Pariwisata menjadi fokus utama di

Kabupaten Aceh Barat, dengan penekanan khusus pada sektor ekowisata. Pemilihan sektor ekowisata didasarkan pada ketersediaan lokasi ekowisata yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Strategi pemasaran daerah melalui brand daerah yang kokoh menjadi panduan penting dalam menyusun strategi, taktik, dan visualisasi *brand* kota. Dengan strategi *Smart Branding* yang kuat, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Aceh Barat. Oleh karena itu, diperlukan panduan yang jelas dalam meningkatkan daya saing melalui strategi pemasaran di era digital agar investor tertarik untuk datang. Selain itu, membangun kemampuan pelayanan prima (*soft skill*) juga menjadi faktor kunci yang mendukung citra positif daerah dalam konsep *Smart City*.

Tabel 3.4 berikut adalah strategi pembangunan *Smart Branding* Kabupaten Aceh Barat, yang akan menggambarkan bagaimana konsep ini diwujudkan di lapangan.

Tabel 3.4 Strategi Pembangunan Smart Branding

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Tourism</i>	Pengembangan Ekosistem Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan kepariwisataan 2. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota 4. Penyelenggaraan promosi penanaman modal 5. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal 6. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal 7. Pengembangan sistem pelayanan publik yang prima
<i>Business</i>	Pegembangan Ekonomi Kreatif Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Dashboard <i>E-Commerce</i> yang terintegrasi dengan <i>Aceh Barat Command Center (ATCC)</i> 2. Mendorong semangat wirausaha melalui organisasi kepemudaan, komunitas pemuda dan pelajar 3. Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan 4. Pengembangan kawasan wisata kuliner yang kaya rasa, kaya menu, nyaman dan aman

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
	Meningkatkan pembangunan pariwisata yang berkualitas secara merata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
<i>Appearance</i>	Terciptanya Wajah Kota Dengan Tata Ruang Yang Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan taman kota yang nyaman, aman dan layak bagi anak, pemuda dan lansia. 2. Peningkatan layanan publik <i>wifi</i> yang mendukung user 3. Pembuatan papan informasi nilai sejarah pada bangunan-bangunan kota pusaka 4. Pengembangan pola navigasi wisata digital

3.3 Smart Economy

Tabel 3.5 Analisis SWOT Dimensi Smart Economy

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendampingan/ penyuluhan 2. Memberikan bantuan Prasarana Pertanian 3. Adanya Hand Traktor 72 Unit, Traktor 7 Unit dan Combine 7 unit 4. S3 1orang, S2 7 Orang dan S1 75 Orang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangya Inovasi 2. Tidak ada anggaran untuk melaksanakan Diklat 3. Kurangnya Kendaraan Operasional Lapangan 4. Masih kurangnya ketersediaan Alsintan 5. Kurangnya SDM khususnya dibidang IT

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Eksternal	5. Penyuluh dan Petani 6. Pernah mendapatkan penghargaan perencanaan Tk. Kab. Aceh Barat Tahun 2022 7. Tersedianya dukungan anggaran	6. Kurangnya biaya operasional penyuluh 7. Kurang ideal jabatan fungsional
Peluang	Strategi Peluang dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Peluang
1. Hampir 75% masyarakat Aceh Barat bekerja sebagai petani 2. Adanya program pembangunan prasarana pertanian 3. Adanya program pengembangan sarana pertanian 4. Adanya E-absensi meningkatkan disiplin ASN 5. Adanya dukungan anggaran dari APBN, DOKA dan DAK 6. Adanya peluang mendapatkan dana bantuan berupa CSR, zakat	3. Adanya kelompok-kelompok tani 4. Meningkatkan Indeks Pertanaman dari 2 kali menjadi 3 kali 5. Meningkatkan produksi dan produktivitas padi Terlaksananya program pembangunan pertanian	1. Dukungan anggaran mengadakan pelatihan petani dalam penerapan teknologi 2. Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan 3. Mendorong peran sektor swasta

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya alih fungsi lahan pangan menjadi lahan non pangan 2. Gagal panen 3. Petani tidak melakukan penanaman serentak 4. Masih ada petani yang tidak menggunakan bibit unggul 5. Petani masih ada yang menggunakan sistem tradisional 6. Image negative hanya sebagian petani/poktan yang memperoleh bantuan 7. Penyaluran bantuan APBN tidak tepat waktu 8. Adanya image negatif yang beredar di kalangan masyarakat tentang penyaluran zakat yang tidak tepat sasaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan 2. Lancarnya akses petani 3. Melakukan penanaman serentak dari 2 kali menjadi 3 kali 4. Melakukan sosialisasi secara terbuka baik di surat kabar maupun di media sosial mengenai penyaluran zakat dan infaq 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas petani 2. Menyelenggarakan Diklat khusus untuk upgrading skill penyuluh dalam hal optimalisasi penggunaan sosial media untuk keperluan penyuluhan

Smart Economy merupakan dimensi ketiga dalam konsep *Smart City*, yang diharapkan dapat signifikan meningkatkan kualitas perekonomian dan daya saing suatu kota. Dimensi *Smart Economy* ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang cerdas dan inovatif, yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.

Strategi pembangunan *Smart Economy* di Kabupaten Aceh Barat adalah kunci dalam menghadirkan konsep ini. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang cerdas dan berkelanjutan. Ini melibatkan

berbagai inisiatif dan upaya, termasuk membangun infrastruktur teknologi yang canggih, mendorong inovasi dan kewirausahaan, serta mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dalam era digital.

Konsep *Smart Economy* di Kabupaten Aceh Barat akan menggabungkan berbagai elemen strategis, termasuk:

1. Infrastruktur Teknologi: Memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi yang baik, seperti jaringan internet yang cepat dan luas, untuk mendukung pertumbuhan bisnis digital dan kreatif.
2. Inovasi dan Kewirausahaan: Mendorong inovasi dalam berbagai sektor ekonomi dan mendukung pertumbuhan bisnis lokal.
3. Pendidikan dan Pelatihan: Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang mendukung peningkatan keterampilan di bidang teknologi dan ekonomi digital.
4. Kemitraan dengan Sektor Swasta: Membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
5. Promosi Ekonomi Lokal: Memasarkan dan mendukung produk dan layanan lokal untuk meningkatkan daya tarik bagi investor dan wisatawan.
6. Berkesinambungan dan Ramah Lingkungan: Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.6 menampilkan strategi pembangunan *Smart Economy* Kabupaten Aceh Barat secara lebih rinci, yang akan memberikan pandangan mendalam tentang implementasi konsep *Smart Economy* dalam konteks daerah ini.

Tabel 3.6 Strategi Pembangunan Smart Economy

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Industry</i>	Terciptanya ekosistem industri pendukung <i>Smart City</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Ekonomi Industri yang Berdaya Saing: <ol style="list-style-type: none"> a. Memprioritaskan pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah untuk memperkuat perekonomian lokal. Ini mencakup identifikasi dan promosi sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif di wilayah tersebut. b. Mendukung usaha mikro dan kecil dalam mengakses sumber daya, pelatihan, dan pasar, sehingga mereka dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Mengembangkan Keterkaitan Sistem Produksi, Distribusi, dan Pelayanan: <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan integrasi antara sistem produksi, distribusi, dan pelayanan untuk menciptakan efisiensi dan keterkaitan yang lebih baik dalam ekosistem ekonomi daerah. b. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi konektivitas antara berbagai aspek produksi dan distribusi yang berkelanjutan. 3. Meningkatkan Iklim Investasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Membangun regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan investasi, termasuk insentif fiskal dan perizinan yang lebih efisien. b. Membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk menarik investasi lokal dan asing ke daerah tersebut. c. Mempromosikan Kabupaten Aceh Barat sebagai tujuan investasi yang menarik melalui kampanye pemasaran dan pameran.

<p><i>Welfare</i></p>	<p>Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG): <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan BUMG: Mendorong pemberdayaan BUMG sebagai entitas ekonomi lokal yang dimiliki oleh gampong (desa). Ini dapat mencakup penyediaan pelatihan, pendampingan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membantu BUMG tumbuh dan berkembang. b. Diversifikasi Usaha: Mendorong BUMG untuk mendiversifikasi usaha mereka sehingga tidak hanya tergantung pada satu jenis usaha. Ini dapat mencakup pengembangan berbagai sektor seperti pertanian, manufaktur, dan jasa. c. Akses ke Pembiayaan: Membantu BUMG dalam mengakses pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan mereka. 2. Peningkatan Kualitas Usaha Kecil Menengah (UKM): <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan dan Pelatihan: Menyediakan program pendidikan dan pelatihan kepada pemilik UKM untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha. b. Akses ke Pasar: Membantu UKM dalam mengakses pasar yang lebih luas, termasuk pasar nasional dan internasional, melalui promosi, kemitraan, dan platform perdagangan elektronik. c. Kemudahan Perizinan dan Regulasi: Meningkatkan kemudahan dalam proses perizinan dan meminimalkan birokrasi yang membebani UKM. Hal ini akan memungkinkan UKM berkonsentrasi pada pengembangan usaha mereka tanpa hambatan administratif yang berlebihan. d. Akses Keuangan: Memastikan akses yang lebih baik ke pembiayaan, termasuk kredit mikro dan modal usaha, sehingga UKM dapat tumbuh dan berkembang.
-----------------------	---	---

<p><i>Transaction</i></p>	<p>Penguatan tatanan ekonomi Syariah di dalam ekosistem pelayanan, pengelolaan dan transaksi keuangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan Kelompok Usaha dan Koperasi Syariah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan Kelompok Usaha: Mendukung dan memfasilitasi kelompok usaha lokal, termasuk kelompok usaha yang berbasis prinsip-prinsip Syariah. Ini dapat mencakup penyediaan pelatihan, peralatan, dan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha mereka. b. Promosi Prinsip Syariah: Memasyarakatkan prinsip-prinsip Syariah dalam bisnis dan usaha lokal dengan mengedukasi dan memberikan informasi kepada pemilik usaha dan masyarakat. Ini juga dapat mencakup promosi produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. c. Koperasi Syariah: Mendorong pembentukan dan perkembangan koperasi Syariah sebagai bentuk usaha yang berlandaskan pada nilai-nilai Syariah. Koperasi Syariah dapat menjadi entitas yang kuat dalam pengembangan ekonomi lokal. 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Pengembangan, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualitas Pelayanan Publik: Meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk layanan administrasi masyarakat, layanan informasi publik, dan layanan sosial masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan. b. Pengembangan Pendapatan Daerah: Mencari sumber-sumber pendapatan alternatif untuk daerah, seperti pengembangan pariwisata, peningkatan investasi, dan diversifikasi ekonomi. Ini akan membantu daerah menjadi lebih mandiri dari sumber pendapatan yang terbatas. c. Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efisien: Memastikan bahwa pendapatan daerah dikelola dengan efisien, termasuk perencanaan dan penganggaran yang cermat. Pengendalian pengeluaran yang bijak juga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah.
---------------------------	--	--

3.4 Smart Living

Tabel 3.7 Analisis SWOT Dimensi Smart Living

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
Faktor Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai 2. Program penurunan angka stunting berjalan dengan baik 3. Tersedianya hutan dan taman kota yang disediakan pemerintah 4. Tersedianya sistem informasi layanan, seperti layanan bantuan kuliah jalur bidikmisi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem informasi pendukung di dinas Kesehatan masih kurang memadai 2. Kerjasama lintas program masih belum berjalan dengan baik 3. Pola hidup sehat masyarakat yang masih sangat rendah 4. Tenaga kerja banyak yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan 5. Kurangnya angkutan massal
Peluang	Strategi Peluang dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Peluang
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peluang pemanfaatan sistem informasi Kesehatan yang ada di pemerintah pusat dan provinsi 2. Adanya kerja sama dengan Lembaga Pendidikan 3. Perkembangan pengguna teknologi internet yang semakin meningkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan Jaringan Telekomunikasi Informasi yang mudah diakses 2. Menyediakan Sistem Informasi Layanan Publik yang mudah diakses oleh masyarakat 3. Tersedianya Sistem Aplikasi Laporan 4. Menyediakan Jambo Wifi / Shelter Wifi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih awamnya masyarakat terhadap teknologi informasi 2. Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi dalam pelaksanaan kerja sama lintas program 3. Tidak terkontrolnya anak-anak yang menggunakan internet

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggapan negatif masyarakat terhadap dinas terkait belum baik 2. Semakin luasnya kerusakan akibat pertambangan baik legal maupun ilegal 3. Terbatas dan Tingginya harga bbm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakomodir berita hoax yang beredar 2. Adanya timer hidup mati jaringan wifi 3. Menjaga ketersediaan bbm bagi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Wifi rawan kecurian 2. Banyak jaringan internet shelter yang disalahgunakan (hal negative) 3. Mengantisipasi stabilitas ketersediaan bahan bakar minyak

Pengembangan hunian dan pola kehidupan cerdas dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan langkah kunci dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Strategi pembangunan *Smart Living* mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk memberikan lingkungan yang lebih nyaman, efisien, dan berkelanjutan bagi penduduk. Strategi *Smart Living* ini bertujuan untuk menciptakan komunitas yang cerdas, terkoneksi, dan terinformasi di Kabupaten Aceh Barat. Tabel 3.8 merupakan strategi pembangunan *Smart Living* Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 3.8 Strategi Pembangunan Smart Living

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Harmony</i>	Terkendalinya Tata Ruang Kabupaten Aceh Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui penegasan aturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang. 2. Pengembangan rencana kawasan di masa depan dengan desain terpadu dan berwawasan lingkungan. 3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pengelolaan air limbah yang layak

		4. Terwujudnya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan yang Strategis
<i>Health</i>	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan program yang mengarah pada perbaikan kesehatan masyarakat 2. Pengembangan sistem Pelayanan kesehatan terpadu dari puskesmas, bidan, rumah sakit dan dokter praktek yang terintegrasi dan ramah anak. 3. <i>Total Quality Management (TQM)</i> dan <i>Quality Assurance</i> pelayanan kesehatan 4. Tersedianya Saluran Drainase Lingkungan Berikut Operasional dan Pemeliharaannya 5. Meningkatkan Jumlah Perumahan Layak Huni yang Berkualitas serta Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh 6. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Terintegritas dengan Lingkungan yang Sehat
<i>Mobility</i>	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum, Prasarana dan Sarana Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya kebutuhan kelompok berkebutuhan khusus di ruang publik 2. Pengembangan sistem transportasi umum yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan transportasi <i>non-motorized</i> 3. Menerapkan kebijakan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jam puncak di pusat kota dan pinggiran kota. 4. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Fasilitas Keselamatan Jalan 5. Kegiatan Penyusunan Rencana Perluasan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi

3.5 Smart Society

Tabel 3.9 Analisis SWOT Dimensi Smart Society

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sistem pendidikan Islami 2. Tersedianya staf yang menguasai Teknologi Informasi walaupun belum professional 3. Memiliki lembaga pelatihan dan industri unggul dalam menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan dengan pola magang 4. Adanya potensi pengembangan lahan untuk permukiman transmigrasi 5. Penghargaan akseptor Keluarga Berencana terbanyak se Aceh 6. Tersedianya aplikasi elsimil yang merupakan aplikasi pemantauan calon pengantin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pagu anggaran kegiatan 2. Minimnya pendidikan dan pelatihan kepada pegawai 3. Kurangnya tenaga Teknologi Informasi yang professional yang mengakibatkan penyelesaian tugas bertumpu pada beberapa orang saja
Faktor Eksternal		
Peluang	Strategi Peluang dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Peluang
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekrutan pegawai yang berkompeten untuk menunjang aktivitas perkantoran 2. Penambahan anggaran kegiatan 3. pelatihan dan pemagangan dalam membantu mengurangi pengangguran 4. Peruntukan kawasan sebagai rencana lokasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem pendidikan Islami dengan menjalin hubungan dengan instansi pendidikan dan dayah 2. Memberikan pendidikan dan pelatihan Teknologi Informasi secara kontinu 3. Melakukan pelatihan dan pemagangan untuk para calon pencari kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan pagu anggaran dan bantuan Provinsi untuk setiap tahunnya 2. Penganggaran biaya untuk pendidikan dan pelatihan bagi pegawai secara kontinu 3. Penyediaan fasilitas Balai Latihan Kerja 4. Penyediaan Kawasan permukiman transmigrasi yang layak

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<p>pemukiman transmigrasi</p> <p>5. Jumlah catin yang terdaftar dalam aplikasi elsimil semakin meningkat</p> <p>6. Adanya tim pendamping keluarga dari desa guna mewujudkan keluarga yang berkualitas</p>	<p>4. Membuat rencana tata ruang wilayah permukiman transmigrasi</p> <p>5. Peningkatan jumlah keluarga akseptor dalam mencapai penghargaan keluarga akseptor terbanyak</p> <p>6. Sosialisasi terkait penggunaan aplikasi elsimil</p>	<p>5. Pembuatan aplikasi pelaporan kekerasan secara online</p> <p>6. Memberikan edukasi kepada tim pendamping keluarga dalam mewujudkan keluarga berkualitas</p>
<p>Ancaman</p> <p>1. Adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Dayah</p> <p>2. Kurangnya kemampuan/skill pekerja lokal dibandingkan dengan non lokal</p> <p>3. Banyaknya penduduk yang tidak menetap dilokasi transmigrasi karena sarana dan prasarana yang belum memadai</p> <p>4. Masyarakat mempunyai pemahaman yang salah terkait pemakaian alat kontrasepsi kepada akseptor sebagai cara untuk membatasi keturunan</p>	<p>Strategi Ancaman dan Kekuatan</p> <p>1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat MPD</p> <p>2. Penyiapan tenaga kerja yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja</p> <p>3. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang lengkap</p> <p>4. Menargetkan kabupaten Aceh Barat sebagai penghargaan sebagai kabupaten dengan keluarga akseptor terbanyak</p> <p>5. Sosialisasi aplikasi yang dimiliki OPD dan manfaat yang bisa didapatkan melalui aplikasi tersebut</p>	<p>Strategi Kelemahan dan Ancaman</p> <p>1. Penambahan anggaran untuk dapat merealisasikan berbagai program</p> <p>2. Adanya fasilitas gedung kantor yang layak agar masyarakat lebih mengenal Sekretariat MPD</p> <p>3. Penyiapan tenaga kerja yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.</p> <p>4. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang lengkap</p> <p>5. Memberikan pelatihan guna peningkatan skill Teknologi Informasi</p> <p>6. Membangun kerja sama yang baik dalam mengedukasi masyarakat terkait pemakaian alat kontrasepsi</p>

Masyarakat adalah bagian dasar dari setiap kota, dan setiap individu membawa ide, nilai moral, keyakinan, pandangan, kebiasaan, dan harapan masa depan yang berbeda. Dalam konsep *Smart Society* atau Masyarakat Cerdas, penting untuk meningkatkan interaksi sosial yang positif antara individu, kelompok, dan antar-kelompok.

Smart Society, yang diperkuat oleh teknologi digital dan kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dan sektor swasta, dapat memberikan kontribusi signifikan pada perkembangan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti sosial dan ekonomi, serta membantu pemerintah dan bisnis mencapai efektivitas dalam layanannya. Namun, hal ini hanya dapat tercapai jika semua pihak, yaitu masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah, memiliki pemahaman teknologi informasi dan komunikasi yang setara.

Masyarakat yang tersebar di Kabupaten Aceh Barat adalah aset berharga dalam pembangunan kota, dan oleh karena itu, perlindungan mereka adalah prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat. Perlindungan mencakup keamanan, keselamatan, dan upaya untuk menjaga keberlanjutan hidup mereka. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan akses ke informasi, pengetahuan, dan pelatihan mitigasi bencana. Hal ini membantu mereka dalam menghadapi berbagai risiko dan ancaman yang mungkin muncul dan berdampak pada mereka, keluarga, harta benda, dan lingkungan tempat mereka tinggal.

Kreativitas dan inovasi masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan perkotaan. Dukungan dalam bentuk penelitian dan pengembangan, dengan melibatkan masyarakat secara aktif, dapat menghasilkan kolaborasi yang membawa semangat keterbukaan dan kerja sama. Hal ini mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan perkotaan dan memajukan daerah Kabupaten Aceh Barat menuju masa depan yang lebih cerdas.

Tabel 3.10 Strategi Pembangunan Smart Society

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Community</i>	Meningkatnya Interaksi Sosial Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan lembaga masjid/Meunasah 2. Pemenuhan kebutuhan kaum difabel 3. Peningkatan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 4. Pembangunan/pengembangan sarana/prasarana ibadah di perkantoran dan pasar 5. Capaian Pembangunan Yang Responsif Gender 6. Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang 7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi gampong 8. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan mukim dan gampong 9. Pencapaian peningkatan kualitas pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat 10. Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang 11. Meningkatkan pelayanan yang maksimal
<i>Learning</i>	Meningkatnya Literasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesadaran pemanfaatan internet secara positif dan produktif serta penguatan sosialisasi qanun dan penyuluhan agama islam menggunakan pendekatan TIK 2. Penguatan peran pemuda sebagai duta baca di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing 3. Pelaksanaan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan tingkat mukim dan gampong 4. Pelaksanaan pemantapan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan nilai-nilai sosial budaya 5. Pengembangan pemanfaatan Sumber Daya berwawasan teknologi tepat guna 6. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah yang sesuai standar akreditasi 7. Mengeluarkan regulasi keterlibatan guru dayah disekolah formal 8. Mewujudkan nilai-nilai Adat Istiadat di Kabupaten Aceh Barat
<i>Security</i>	Meningkatnya Layanan Mitigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan dan pengembangan Gampong siaga bencana 2. Penguatan komunitas berbasis <i>security</i> dalam menghadapi ancaman-ancaman terkait keamanan data 3. Peningkatan infrastruktur dan sarana penanggulangan bencana 4. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebencanaan

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
		5. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan kedaruratan yang efisien, efektif dan responsif

3.6 Smart Environment

Tabel 3.11 Analisis SWOT Dimensi Smart Environment

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki beberapa pelayan terpadu menyangkut dengan lingkungan seperti, pelayanan persampahan, penyewaan alat berat (excavator), pelayanan perizinan, sendot tinja, dan pengaduan kasus lingkungan 2. Aceh Barat sudah memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Gunung Mata Ie 3. Memiliki sumber daya manusia yang sesuai kompetensi. 4. Aceh Barat pernah mendapatkan penghargaan Adipura 2014 dan BPBD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya mobil pengangkut sampah yang sudah tidak layak pakai. 2. Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan pendidikannya 3. Belum terakreditasinya laboratorium lingkungan hidup 4. Masih lemahnya pengawasan terhadap pencemaran lingkungan 5. Koordinasi antar instansi masih lemah 6. Fasilitas Radio dan elektronik / komunikasi yang belum memadai

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<p>Faktor Eksternal</p>	<p>terbaik 1 Tingkat Kabupaten se Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Jumlah tenaga kebersihan sebanyak 242 orang dan tenaga Kebencanaan sejumlah 400 an orang 6. Memiliki 3 excavator, 11 truk pengangkut, 1 mobil toilet, 20 unit Damkar dan 1 laboratorium. 7. Memiliki taman hutan kota wisata dan taman kehati 8. Memilki 5 buah pos Kebencanaan / Kebakaran di 5 Kecamatan 9. Memiliki Gedung Escape Building sebagai home base BPBD 10. Baban kebencanaan Aceh Barat memiliki anggaran > Rp. 10 Milyar/tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Jumlah Tenaga Kebencanaan yang bersertifikat yang masih kurang
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan keuangan sebesar 11 miliar setiap tahunnya dari pemerintah daerah terhadap lingkungan hidup. 2. Adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung upaya pemulihan lingkungan. 	<p>Strategi Peluang dan Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan publik yang cerdas dan inovatif 2. Meningkatkan nilai operasionalisasi TPA Kabupaten Aceh Barat > 71 3. Mengoptimalkan fungsi hutan kota dan ruang terbuka hijau (RTH) 4. Terus membenahi personil Tenaga Kebencanaan yang memadai dan berpengalaman untuk 	<p>Strategi Kelemahan dan Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengadaan mobil pengangkut sampah baik anggaran pusat maupun daerah. 2. Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dalam meningkatkan produktivitas dalam bekerja, khususnya untuk pengawas lingkungan hidup (PPLHD). 3. Mengusulkan akreditasi laboratorium dengan

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<p>3. Adanya dukungan pengembangan sumber daya manusia dari pemerintah daerah untuk mengikuti diklat nasional.</p> <p>4. Adanya kerjasama perusahaan dan lintas sektor terkait seperti Pertamina dengan memberikan drum minyak untuk pengadaan tong sampah yang dibagikan ke masyarakat</p> <p>5. Penanganan Kebencanaan menjadi stressing dari Pemerintah Pusat baik secara regulasi maupun secara anggaran</p> <p>6. Didukung regulasi dan anggaran DOKA setiap tahun 3 Milyar</p> <p>7. Menjadi salah satu pusat rujukan edukasi kegemilangan Nasional (Tsunami 2004)</p>	<p>mendapatkan pilot project Kebencanaan Nasional.</p> <p>5. Mencari Pendanaan yang mudah (Non/government)</p> <p>6. Melakukan Peningkatan kapasitas sdm personil kebersihan dan kebencanaan dengan melakukan Kerjasama dengan Lembaga-lembaga penelitian dalam dan luar negeri</p> <p>7. Ikut berpartisipasi dalam setiap program/kegiatan kebencanaan di provinsi maupun nasional.</p> <p>8. Menambah sarana dan prasarana pendukung kebencanaan.</p>	<p>kelengkapan berkas yang memenuhi syarat.</p> <p>4. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait isu lingkungan hidup secara terus menerus.</p> <p>5. Mengajukan Anggaran tambahan untuk memperbaiki/membeli perlengkapan elektronik/komunikasi yang baru dan operasional kegiatan.</p> <p>6. Melakukan pelatihan dan sertifikasi kepada tenaga kebencanaan lebih banyak dan bervariasi.</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap membuang sampah pada tempatnya 2. Menurunnya semangat gotong royong masyarakat terhadap lingkungan 3. Meningkatnya pertumbuhan industri dari berbagai sektor diantaranya sektor pertambangan, perkebunan, pembangkit listrik, dan pengolahan emas yang dapat merusak Sumber Daya Alam (SDA), seperti adanya pencemaran limbah batubara, limbah sungai akibat tambang emas <p>Kondisi Geo-politik Internasional mempengaruhi Kebijakan Nasional/Provinsi/Da era) seperti Krisis ekonomi (defisit anggaran)/wabah mempengaruhi alokasi anggaran kebencanaan dan Image negative fi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan dengan melakukan sosialisasi secara berkala 2. Mendorong pelaku usaha/kegiatan agar menaati aturan lingkungan hidup 3. Mengoptimalkan asset secara maksimal dan efisien sebagai Tindakan preventif menghadapi krisis global. 4. Memperkuat / soliditas koordinasi antar Lembaga dlm menghadapi musibah/tantangan akibat krisis global; 5. Memperkuat ketahanan pangan dan sosialisasi pemahaman kebencanaan kepada masyarakat luas. 6. Memperbaiki image negative masyarakat dengan melakukan kegiatan mitigasi bencana dan melibatkan unsur masyarakat dalam Tim Desa Tangguh/ Kecamatan Tangguh yang memiliki nilai hak dan tanggungjawab didalamnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan yang terkontrol terhadap aktifitas perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Barat 2. Melakukan penyuluhan lingkungan hidup dengan menggunakan berbagai jenis media social yang tersedia 3. Mempercepat pengadaan peralatan elektronik dan operasionalnya 4. Melakukan pelatihan kepada Petugas sehingga memiliki sertifikasi lebih banyak. 5. Mengajukan dan meningkatkan anggaran Mitigasi bencana 6. Membentuk Desa/ Kecamatan Tangguh 7. Membuat/ mengadakan aplikasi kebencanaan yg dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat walaupun dalam keadaan offline. 8. Membuat Kegiatan “ Simulasi Bencana” secara berkala, sebagai upaya melatih/memantapkan kesiapsiagaan semua komponen terhadap bencana dengan melibatkan seluruh komponen, pemerintah,

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
kalangan Masyarakat bahwa kalau ada bencana baru ada proyek.		Masyarakat, Swasta, Oerganisasi Masyarakat, dll

Pengembangan lingkungan kota yang cerdas melalui pengelolaan sumber daya lingkungan memerlukan strategi yang kuat dan pemanfaatan teknologi yang terus berkembang. Penting untuk mengembangkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan akademisi dalam upaya mengelola lingkungan hidup perkotaan dengan cara yang berkelanjutan.

Ini juga berlaku untuk pengelolaan sumber daya dan limbah di Kabupaten Aceh Barat. Dengan peningkatan produksi sampah dan limbah, pendekatan "*zero waste*" yang berfokus pada teknologi, konsep daur ulang, dan ekonomi *circular* (siklus tertutup) berbasis sampah menjadi kebutuhan mendesak. Ini tidak hanya membantu mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga merespons komitmen global untuk mengurangi polusi dan mendukung energi terbarukan.

Kita menyadari bahwa sumber daya energi fosil semakin terbatas dan ada dorongan global untuk mengurangi polusi yang berkontribusi pada pemanasan global. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu memanfaatkan sumber daya energi terbarukan dan potensinya sepenuhnya.

Tabel 3.12 Strategi Pembangunan Smart Environment

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Protection</i>	Peningkatan Proteksi Terhadap Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik: <ol style="list-style-type: none"> a. Membangun dan menyediakan area RTH publik yang memadai, sesuai dengan panduan dalam Rencana Tata Ruang kota. b. Memastikan kualitas RTH tersebut dengan perencanaan taman yang baik, penghijauan, dan area terbuka yang nyaman bagi masyarakat. 2. Pemeliharaan dan Pengelolaan RTH Publik: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemeliharaan berkala dan perawatan RTH publik untuk memastikan fungsi ekologis (ekosistem), sosial (kemanfaatan masyarakat), ekonomi (potensi ekonomi), dan estetika (keindahan) terjaga dengan baik. b. Mengoptimalkan penggunaan RTH publik untuk kepentingan lingkungan, masyarakat, dan ekonomi kota. 3. Konservasi Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati: <ol style="list-style-type: none"> a. Melestarikan keseimbangan ekosistem di dalam RTH publik dan menjaga keanekaragaman hayati yang ada. b. Memperhatikan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) yang ada sebagai bagian integral dari sistem penyangga kehidupan dalam kota.
<i>Waste</i>	Peningkatan Tata Kelola Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Upaya 3R: <p>Menedukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep 3R (Reuse, Reduce, Recycle) yang mencakup praktik-praktik seperti mengurangi limbah, mendaur ulang, dan menggunakan kembali barang-barang. Ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan dan informasi yang mudah diakses.</p>

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
		<p>2. Pengembangan Sistem Insentif dan Disinsentif untuk 3R:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membangun sistem insentif yang mendorong masyarakat dan bisnis untuk mengadopsi praktik 3R. Hal ini dapat melibatkan penghargaan, pemotongan pajak, atau manfaat lainnya bagi mereka yang berpartisipasi aktif dalam praktik 3R. b. Menetapkan disinsentif atau sanksi bagi pelanggaran terhadap praktik-praktik yang berlawanan dengan 3R, seperti pembuangan sampah ilegal. <p>3. Koordinasi Lintas Sektor dan Perindustrian:</p> <p>Mendorong kerjasama dan koordinasi antara sektor-sektor terkait, khususnya industri dan perdagangan, dalam upaya menerapkan praktik 3R. Ini bisa mencakup kebijakan bersama dan praktik bisnis yang berkelanjutan.</p> <p>4. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Sampah:</p> <p>Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan pengelolaan sampah untuk memastikan bahwa proses pengumpulan, pemrosesan, dan pembuangan sampah berjalan dengan efisien dan sesuai standar kebersihan lingkungan.</p> <p>5. Pendekatan Circular Economy untuk Sampah Rumah Tangga:</p> <p>Mendorong masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga dan mengenali nilai ekonomi dalam beberapa jenis sampah yang dapat didaur ulang atau diolah kembali. Hal ini sesuai dengan konsep ekonomi circular yang berfokus pada penggunaan sumber daya yang berkelanjutan.</p> <p>6. Peningkatan Ketersediaan Septic Tank Komunal:</p>

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
		Meningkatkan ketersediaan septic tank komunal di daerah yang mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur sanitasi. Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan sanitasi lingkungan dan mengurangi polusi
<i>Energy</i>	Terciptanya Tata Kelola Energi Berwawasan Lingkungan Yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Penggunaan Tenaga Surya pada Sarana Umum: <ol style="list-style-type: none"> a. Memasang panel surya pada sarana umum seperti taman kota, penerangan jalan, atau bangunan pemerintah untuk menghasilkan energi surya yang ramah lingkungan. b. Memanfaatkan tenaga surya untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional, mengurangi emisi karbon, dan menghemat biaya energi. 2. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Kedaruratan yang Efisien, Efektif, dan Responsif: <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan sistem pelaporan darurat dengan teknologi terkini, seperti aplikasi seluler atau situs web, yang memungkinkan masyarakat untuk dengan cepat melaporkan situasi darurat. b. Memastikan bahwa sistem pelaporan darurat dapat merespons dengan cepat dan efektif terhadap laporan, sehingga bantuan dapat diberikan dalam waktu yang sesuai dalam situasi darurat

IV. RENCANA AKSI SMART CITY

Tahap perencanaan aksi Smart City merupakan fondasi dari upaya perubahan yang terstruktur. Ini dimulai dari identifikasi masalah yang jelas dan spesifik, sehingga rencana aksi yang dihasilkan memiliki tujuan yang dapat diukur dan dapat dicapai, realistis, dan dengan batas waktu yang ditetapkan. Rencana aksi Smart City Kabupaten Aceh Barat didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Spesifik (Specific): Setiap langkah dalam rencana aksi memiliki tujuan yang terperinci dan jelas. Tidak ada ambiguitas, sehingga semua pihak dapat memahami apa yang ingin dicapai.
2. Terukur (Measurable): Tujuan dan pencapaian dalam rencana aksi dapat diukur dengan indikator yang jelas. Ini memungkinkan untuk memonitor kemajuan dan mengevaluasi keberhasilan dengan data yang dapat diukur.
3. Dapat Dicapai (Achievable): Rencana aksi didesain sedemikian rupa sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan sumber daya yang ada. Ini memastikan bahwa rencana aksi realistis dan memungkinkan untuk dijalankan.
4. Realistis (Realistic): Rencana aksi mempertimbangkan keterbatasan dan sumber daya yang tersedia. Tujuannya adalah agar rencana tersebut dapat dilaksanakan dalam situasi nyata.
5. Batas Waktu (Timebound): Setiap tindakan memiliki batas waktu yang ditetapkan. Ini menciptakan tanggung jawab untuk menyelesaikan langkah-langkah dalam rencana aksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Rencana aksi Smart City Kabupaten Aceh Barat terdiri dari empat rencana:

1. Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Smart City Kabupaten Aceh Barat: Fokus pada perencanaan kebijakan dan pembentukan lembaga yang mendukung transformasi menjadi Smart City.
2. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City Kabupaten Aceh Barat: Memusatkan perhatian pada pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung layanan Smart City.
3. Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City Kabupaten Aceh Barat: Menyusun langkah-langkah untuk membangun aplikasi dan perangkat lunak yang mendukung layanan dan inisiatif Smart City.
4. Rencana Penguatan Literasi Smart City Kabupaten Aceh Barat: Fokus pada peningkatan pemahaman dan literasi masyarakat terkait konsep dan praktik Smart City.

Rencana aksi ini membantu Kabupaten Aceh Barat dalam perjalanan mereka menuju transformasi menjadi Smart City yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, rencana ini diharapkan dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

4.1 Pengembangan Kebijakan Dan Kelembagaan Smart City Kabupaten Aceh Barat

4.1.1 Kebijakan

Meskipun belum ada Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan Smart City di Kabupaten Aceh Barat, pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini diatur dengan mengacu pada Buku Perencanaan Induk Pengembangan E-Government Kabupaten Aceh Barat. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis TIK dan mendorong pembuatan aturan terkait Smart City di Kabupaten Aceh Barat.

Saat ini, Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Aceh Barat sedang dalam proses penyusunan masterplan Smart City dan Peraturan Bupati yang akan mengatur pelaksanaan Smart City di kabupaten ini. Untuk memastikan keberlanjutan program Smart City dalam jangka panjang, langkah-langkah ini akan selalu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 4.1 Rencana Aksi Pengembangan Kebijakan Smart City Kabupaten Aceh Barat

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko	Peningkatan Kualitas Pengawasan lebih tepat Sasaran Berdasarkan Risiko setiap OPD	Terbentuknya PKPT berbasis Risiko	Inspektorat dan Seluruh OPD dilingkup Aceh Barat	<i>Smart Governance</i>	2024
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Asistensi dibidang Pengawasan	Peningkatan Kualitas pada setiap Kompenen Pemerintahan di Aceh Barat dalam pemahamam Manajemen Risiko	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Peningkatan Nilai Indeks di setiap Komponen Pemerintahan di	Inspektorat dan Seluruh OPD dilingkup Aceh Barat	<i>Smart Governance</i>	2024

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
		Aceh Barat			
Penyusunan kebijakan kepariwisataan	Peningkatan kualitas, kuantitas, dan pemberdayaan kepariwisataan	Qanun RIPPARKAB Aceh Barat	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	<i>Smart Branding</i>	2024
Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	Menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing	Tersedianya regulasi pemberian fasilitas insentif di bidang penanaman modal, tersedianya payung hukum dan regulasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan serta pengawasan perizinan dan nonperizinan di daerah	DPMPTSP	Smart Branding	2024
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas pelaporan kinerja ASN Aceh BARat	Indek nilai LKJiP Kabupaten	Setdakab	<i>Smart Governance</i>	2024
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Fasilitas Keselamatan Jalan	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Keselamatan Jalan	Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan Sesuai dengan Peraturan	Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat	<i>Smart Living</i>	2023

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
		dan Ketentuan yang Berlaku			
Kegiatan Penyusunan Rencana Perluasan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Layanan Angkutan Darat dan Laut	Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat	<i>Smart Living</i>	2023
Mengeluarkan regulasi keterlibatan guru dayah disekolah formal.	Meningkatkan Kualitas dan Peran Guru Dayah	Jumlah Guru Dayah Yang mengajar disekolah formal.	Dinas Pendidikan Dayah	<i>Smart Society</i>	2023
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik, menggunakan hak berorganisasi dan menggunakan hak pilih;	Terpantaunya penyelenggaraan Pemilu dengan mengoptimalkan peran Desk Pemilu dalam hal anggaran dan fungsi;	Badan Kesbangpol Kab. Aceh Barat	Smart Governance	2024
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,	Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat dalam	Efektifnya peran FKDM dalam melaksanakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Barat	Smart Governance	2024

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	menghadapi berbagai ancaman.	cegah dini dalam mengantisipasi terjadi konflik dan gangguan kantramtibmas			

4.1.2 Kelembagaan

Kelembagaan adalah bagian penting dalam pelaksanaan Smart City di Kabupaten Aceh Barat. Dua elemen utama dalam hal ini adalah Dewan Smart City dan Tim Pelaksana Smart City. Mereka memiliki peran dan tugas sebagai berikut:

a. Dewan Smart City

1. Memberikan arahan strategis untuk pengembangan Smart City sesuai dengan visi dan kebutuhan.
2. Memberikan persetujuan dan dukungan untuk kebijakan dan rencana pengembangan Smart City.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proyek Smart City.

b. Tim Pelaksana Smart City

1. Mengusulkan program dan kegiatan untuk pengembangan Smart City.
2. Melaksanakan program-program ini dengan mengoordinasikan berbagai sektor dan aspek.
3. Mengikuti arahan dari Dewan Smart City.
4. Merumuskan inovasi dan mengusulkannya kepada Dewan Smart City.
5. Melakukan perencanaan, pengembangan, dan implementasi Smart City secara terkoordinasi dan terpadu di seluruh sektor.
6. Melaporkan kemajuan kepada Dewan Smart City.
7. Mendukung partisipasi pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat.

Pembentukan Dewan Smart City yang melibatkan berbagai pihak telah memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan Smart City yang berkelanjutan. Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, perlu disusun Standard Operating Procedure (SOP) Smart City. SOP ini akan membantu menggerakkan semua elemen yang terlibat. Selain itu, penting juga memperhatikan peran masyarakat sipil dalam Smart City, seperti kerja sama dengan perguruan tinggi dan komunitas yang telah berkontribusi dalam upaya pengembangan Smart City di Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 4.2 Rencana Aksi Pengembangan Kelembagaan Smart City Kabupaten Aceh Barat

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
Pelaksanaan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan tingkat mukim dan gampong	Terlaksananya pemantapan penyelenggaraan pemerintahan tingkat mukim dan gampong;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat 2. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 	DPMG	Smart Society	2024
Pelaksanaan pemantapan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan nilai-nilai sosial budaya	Terlaksananya pemantapan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan nilai-nilai sosial budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM berprestasi 2. PKK Aktif 3. Persentase Gampong yang Menyusun APBDES 4. Posyandu Aktif 	DPMG	Smart Society	2023

Pembentukan organisasi forum Kabupaten <i>Aceh Barat Smart City</i>	Penguatan peran serta kepemudaan, komunitas dan perempuan dalam kegiatan sosial	Terbentuknya forum <i>Smart City</i>	SETDA, DISKOMINFO	<i>Smart Society</i>	2024
---	---	--------------------------------------	----------------------	----------------------	------

4.2 Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City

Infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Aceh Barat sangat baik dan mencakup seluruh wilayah kabupaten. Jaringan ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu kabel serat optik (Fiber Optic/FO) dan jaringan nirkabel. Jangkauan internet telah meliputi seluruh wilayah, bahkan hingga ke tingkat gampong, memastikan akses internet yang merata bagi seluruh penduduk.

Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten ini sudah terhubung menggunakan kabel serat optik (FO), yang menyediakan koneksi internet dengan kecepatan dan keandalan tinggi. Namun, masih ada beberapa gampong yang belum terhubung dengan infrastruktur kabel FO.

Server-server yang digunakan dalam operasional pemerintahan Kabupaten Aceh Barat tersebar di beberapa SKPD. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengonsolidasikan server-server ini secara terpusat di bawah wewenang Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO). Dengan demikian, pengelolaan data dan aplikasi pemerintahan akan lebih efisien, dan koordinasi antara SKPD dapat ditingkatkan.

Kabupaten Aceh Barat memiliki infrastruktur pendukung yang kuat untuk mengimplementasikan inisiatif Smart City. Dengan akses internet yang merata dan rencana pengkonsolidasian server, kabupaten ini memiliki fondasi yang solid untuk mengembangkan layanan dan solusi cerdas yang dapat meningkatkan kehidupan warga serta efisiensi operasional pemerintahan.

Tabel 4.3 Infrastruktur Pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Ketersediaan Infrastruktur TIK	Ya/ Tidak	Interpretasi
1.	Ketersediaan Jaringan 4G/3G	Ya	Baik
2.	Ketersediaan Broadband Acces	Ya	Baik
3.	Akses Internet Terpusat (didistribusikan)	Tidak	-
4.	Jaringan Antar SKPK (Intra Instansi pemerintah)	Ya	Cukup
5.	Ketersediaan Hotspot untuk internal Pemerintah dan untuk Publik	Ya	Baik
6.	Data Center Pemerintah	Ya	Baik

No	Ketersediaan Infrastruktur TIK	Ya/ Tidak	Interpretasi
7.	Data Center Recovery Pemerintah	Tidak	-

4.3 Rencana Pengembangan Aplikasi Dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City

Kabupaten Aceh Barat, telah mengimplementasikan berbagai layanan aplikasi yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan pemerintahan. Namun, semua aplikasi pemerintah Kabupaten Aceh Barat tersebut, belum diintegrasikan dalam satu portal digital yang dikelola dengan baik, sehingga proses kemudahan akses dan dokumentasi masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Hingga saat penulisan buku ini, sudah ada belasan aplikasi yang berhasil direalisasikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Jumlah ini diperbarui setidaknya setiap tahun melalui survei yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Barat.

Penting untuk dicatat bahwa pengembangan atau pengadaan aplikasi pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat belum semuanya mengikuti metodologi System Development Life Cycle (SDLC) secara menyeluruh. Proses pengembangan aplikasi memerlukan beberapa tahapan, termasuk:

1. Penerjemahan Kebutuhan Bisnis: Mengubah kebutuhan bisnis menjadi spesifikasi desain yang lebih terinci.
2. Desain Aplikasi: Beberapa aplikasi memiliki desain yang rinci, termasuk diagram aliran data (data flow), diagram relasi entitas, dan pengendalian aplikasi yang memastikan pemrosesan yang akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi, dan dapat diaudit, serta keamanan aplikasi yang memastikan kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas data.
3. Implementasi: Mengubah desain teknis menjadi kode program (coding).
4. Penjaminan Mutu: Melakukan uji coba yang mencakup uji unit, uji sistem, uji integrasi, dan Uji Penerimaan Pengguna (User Acceptance Test/UAT).

5. Instalasi dan Penilaian Mutu: Melakukan pemasangan dan penilaian mutu aplikasi.

Penting juga untuk mencatat bahwa setiap aplikasi yang diimplementasikan di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat harus disertai dengan dokumentasi lengkap dari seluruh tahap SDLC, manual pengguna, operasi, dukungan teknis, dan administrasi, serta materi transfer pengetahuan dan pelatihan bagi pengguna dan administrator sistem.

Namun, meskipun telah ada upaya yang signifikan dalam pengembangan aplikasi pemerintah, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Beberapa sistem informasi terpisah dan tidak terintegrasi dengan baik, dan beberapa dibangun menggunakan teknologi tertutup (closed-source) dan skema database yang tidak standar, yang menghambat integrasi dengan sistem lain. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kerangka kerja (framework) dan aplikasi yang memungkinkan interoperabilitas antara sistem informasi di berbagai SKPD, sehingga pengelolaan informasi bisa lebih efisien dan efektif.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mencapai manfaat yang lebih besar dari sistem informasi yang sedang dikembangkan atau sudah berjalan. Integrasi data dari berbagai sumber informasi yang beragam, baik dalam hal perangkat lunak, perangkat keras, atau format data, dapat dilakukan tanpa mengubah seluruh sistem yang ada atau membangun aplikasi pusat yang mahal.

Tabel 4.4 Rencana Aksi Pengembangan Aplikasi Pendukung

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	SKPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
Mengembangkan sistem pembayaran/transaksi non tunai di lingkungan SKPK	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Perbup	BPKD	<i>Smart Governance</i>	2024
Mengembangkan sistem pembayaran/penyetoran PAD secara non tunai di lingkungan Kabupaten Aceh Barat	Meningkatkan Belanja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Perbup	BPKD	<i>Smart Governance</i>	2024
Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal	Pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha	Terlaksananya pelayanan perizinan, jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, tingkat kepatuhan dalam pemenuhan komitmen	DPMPTSP	<i>Smart Branding</i>	2024
Pengembangan sistem pelayanan publik yang prima	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Kecamatan Meureubo	<i>Smart Governance</i>	2024
Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Meningkatnya Akses Penggunaan Teknologi untuk	Aplikasi SIMTANAH	Dinas Pertanahan Aceh Barat	<i>Smart Governance</i>	2024

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	SKPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
	informasi Pertanahan				

Tabel 4 5 Layanan Aplikasi Yang Digunakan pada OPD Kabupaten Aceh Barat

No	Sektor	Daftar Aplikasi
1	Pendidikan	Dapodik
		Dapobud
2	Kesehatan	SIKDA Generik (Sistem Informasi Kesehatan Daerah)
		Aspak (Aplikasi Sarana Prasarana Kesehatan)
		SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)
3	Sumber Daya Manusia	SAPK BKN
		SIUDIN
		IPPNS BKN
		e-Lapkin
		SIPINTER
		SIMPEG
4	Tenaga Kerja Info Kerja	Portal infokerja.naker.go.id
5	Sekretaris DAerah	SPSE V 4.3
		SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)
6	Komunikasi dan Informatika	SiMAYA
		Portal Layanan
		PPID
7	Pengelola Keuangan Daerah	E-Catalog
		Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIM-GAJI)

No	Sektor	Daftar Aplikasi
		Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) DANA DESA
		Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) DAK FISIK
		SIP PBB
8	Perpustakaan	SIKN
9	Inspektorat	SIM-HP
		SIPTL
10	Administrasi Legislasi	JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum)
	Manajemen Kepegawaian	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) https://sapk.bkn.go.id
		Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) Pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
		Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI)
		Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN)
		Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN)

4.4 Rencana Penguatan Literasi Smart City Kabupaten Aceh Barat

Tabel 4.6 Rencana Aksi Penguatan Literasi

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
Sosialisasi/Seminar/ <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) /Penyuluhan					

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan keselarasan pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kecamatan Meureubo	<i>Smart Governance</i>	2024
Pengawasan terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Mempertahankan Stabilitas Patroli dan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Qanun/Perbup tentang Trantibum dan Qanun Syariat Islam	Persentase Penegakan Qanun Syariat Islam	Satpol PP WH	<i>Smart society</i>	2023
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Mempertahankan Stabilitas Patroli dan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Qanun/Perbup tentang Trantibum dan Qanun Syariat Islam	Persentase Linmas Gampong yang aktif	Satpol PP WH	<i>Smart society</i>	2023
Capaian Pembangunan Yang Responsif Gender	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	1. Terwujudnya Keluarga yang sudah mendapat pelayanan konseling keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	<i>Smart Society</i>	2024

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
		2. Tersedianya pusat pembelajaran keluarga di Kabupaten 3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (Tenaga Ahli Konselor) dalam menjalankan Pusat Pembelajaran Keluarga			
Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang	Peningkatan jumlah peserta KB Aktif Tambahan terutama MKJP	1. Capaian ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan Masyarakat 2. Capaian Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	<i>Smart Society</i>	2024

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
		3. Capaian pengembangan Program KKBP di Gampong KB			
Pemenuhan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan. Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.	Sarana dan Prasarana sesuai dengan Permenkes. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	Dinas Kesehatan	<i>Smart Living</i>	2023
Pelaksanaan Kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan dengan OPD dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat	Peningkatan kualitas layanan Publik	Tim Teknis Smart City	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<i>Smart Governance</i>	2024
Mewujudkan nilai-nilai Adat Istiadat di Kabupaten Aceh Barat	Meningkatnya nilai-nilai Adat Istiadat di Kehidupan Masyarakat	Persentase nilai-nilai adat istiadat di Aceh Barat	Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat	<i>Smart Society</i>	2024
UKM/IKM					
Workshop/seminar bisnis promosi UMKM	Pengembangan dan Peningkatan kualitas daripada BUMG dan	Jumlah peserta workshop/seminar	DPMPPTSP	<i>Smart Economy</i>	2024

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
	UKM/IKM				
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan dan penguatan layanan promosi	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	<i>Smart Branding</i>	2024
Penyelenggaraan promosi penanaman modal	Meningkatkan promosi	Terseleenggaranya promosi penanaman modal, terlaksananya koordinasi promosi penanaman modal, jumlah promosi potensi investasi dalam bentuk digital	DPMPTSP	<i>Smart Branding</i>	2024
Melakukan edukasi tentang Qanun Jinayah kepada masyarakat	Peningkatan literasi masyarakat terhadap qanun jinayah	Penurunan angka pelanggaran terhadap qanun syariah islam	SATPOL PP dan WH	<i>Smart Society</i>	2024
Bimbingan Teknis/Pelatihan					

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah (Statistik Survey Sektoral)	Integrasi layanan terutama <i>government to citizen</i> dan <i>government to business</i> serta juga <i>government to government</i> dan <i>government to employee</i> untuk meningkatkan kinerja ASN serta menuju ke Satu Data	Persentase terpenuhinya database statistik daerah	DISKOMINFO	<i>Smart Governance</i>	2024
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terbentuknya Tusi dan analisis jabatan yg sesuai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjalinnnya koordinasi monitoring dan evaluasi dgn perangkat daerah 2. Adanya monitoring kelembagaan yg dilakukan secara berkala. 3. Melakukan update data kebijakan peraturan utk penyusunan atau perubahan penataan kelembagaan 	Setdakab	<i>Smart Governance</i>	2024

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
		4. Adanya asistensi dan pendampingan dlm penyusunan anjab dan ABK			
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah menuju smart City	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Jumlah OPD	Bappeda Aceh Barat	<i>Smart Governance</i>	2024-2026
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah OPD	Bappeda Aceh Barat	<i>Smart Governance</i>	2024-2026
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian menuju Smart City	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Aceh Barat	Jumlah OPD	Bappeda Aceh Barat	<i>Smart Governance</i>	2024-2026
Pengembangan pemanfaatan Sumber Daya berwawasan teknologi tepat guna;	Terlaksananya pemanfaatan Sumber Daya berwawasan teknologi tepat guna	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	DPMG	Smart Society	2023

4.5 Sinkronisasi Program RPJMD Dengan Program Kerja Inovasi Smart City

4.5.1 Smart Governance

Tabel 4.7 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Governance

Misi 1 Smart City: Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, layanan dan birokrasi yang efektif, inovatif, dan efisien
Mendukung Misi RPJMD: Meningkatkan kapasitas aparatur
Tujuan RPJMD: Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Daya Saing Daerah

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan	APBK	931.247.160	BKPSDM	-	2024
		Program Kepegawaian Daerah	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase pemenuhan jabatan pelaksana	APBK	100.000.000	BKPSDM	-	2024
		Program Kepegawaian Daerah	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	APBK	106.343.880	BKPSDM	-	2024
		Program Kepegawaian Daerah	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase jabatan struktural yang terisi	APBK	243.380.650	BKPSDM	-	2024
		Program Kepegawaian Daerah	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase Peningkatan kemampuan dan kualitas ASN	APBK	25.103.051	BKPSDM	-	2024

Misi 1 Smart City: Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, layanan dan birokrasi yang efektif, inovatif, dan efisien
Mendukung Misi RPD: Melaksanakan reformasi birokrasi
Tujuan RPD: Terwujudnya reformasi biroksi dan peningkatan daya saing daerah

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pelaksanaan Kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan dengan OPD dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat	Tim Teknis Smart City	APBD	100.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	OPD Terkait	2024
		Program Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Peraturan Daerah	APBD	140.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		2025
		Program pengelolaan keuangan daerah	Mengembangkan sistem pembayaran/transaksi non tunai di lingkungan SKPK	Tersusunnya Perbup	APBD	50.000.000	BPKD	BANK Persepsi	2024
		Program pengelolaan keuangan daerah	Mengembangkan sistem pembayaran/penyetoran PAD secara non tunai di lingkungan Kabupaten Aceh Barat	Tersusunnya Perbup	APBD	50.000.000	BPKD	BANK Persepsi	2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Program perencanaan, pengendalian Dan evaluasi pembangunan daerah	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah menuju smart City	Jumlah OPD yang melakukan Assistensi Perencanaan Perangkat Daerah menuju Smart City	APBK	90.000.000	Bappeda	-	2023-2026
		Program perencanaan, pengendalian Dan evaluasi pembangunan daerah	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah menuju smart City	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang terinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	APBK	75.000.000	Bappeda	-	2023-2026
		Program penelitian dan pengembangan Daerah	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian menuju Smart City	Jumlah Penelitian terkait pembangunan menuju smart City yang terfasilitasi	APBK	294.000.000	Bappeda	-	2023-2026
		Program penelitian dan pengembangan Daerah	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang memiliki SOP	APBK	75.000.000	Bappeda	-	2023-2026
		Program pengelolaan sistem informasi pertanahan	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen	Aplikasi SIMTANAH	APBD	121.200.000	Dinas Pertanahan		2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
			Pertanahan (SIMTANAH)						
		Program penyelenggaraan pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah berdasarkan Manajemen Risiko	Terlaksananya PKPT berbasis Risiko	APBD	2.902.174.457	Inspektorat	BPKP,B PK-RI,OPD dilingkup Aceh Barat	2024
		Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Asistensi dibidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Peningkatan Nilai Indeks di setiap Komponen Pemerintahan di Aceh Barat	APBD	377.922.300	Inspektorat	BPKP,B PK-RI,OPD dilingkup Aceh Barat	2024
		Pemerintah dan kesejahteraan rakyat	Penataan Administrasi Pemerintahan Fasilitasi Bantuan Hukum	Capaian indeks LPPD Selesainya kasus hukum pemerintah	DTU (Dana Alokasi Umum)	Rp.195 juta Rp. 150 juta	Setdakab		2024
		Perekonomian dan pembangunan	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laju inflasi daerah menurun	DTU (Dana Alokasi Umum)	Rp. 80 juta	Setdakab		2024
		Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai Reformasi Birokrasi Nilai LKJiP Kabupaten Terjalannya koordinasi monitoring dan evaluasi dgn perangkat daerah Adanya monitoring kelembagaan yg	DTU (Dana Transfer umum)	1.Rp.85 juta 2.Rp.35 Juta 3.Rp 84 juta	Setdakab, bagian Organisasi		2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
				dilakukan secara berkala. Melakukan update data kebijakan peraturan utk penyusunan atau perubahan penataan kelembagaan Adanya asistensi dan pendampingan dlm penyusunan anjab dan ABK					
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terpantaunya penyelenggaraan Pemilu dengan mengoptimalkan peran Desk Pemilu dalam hal anggaran dan fungsi; Persentase Pelanggaran Pemilu	APBD	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Barat	-	2024
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	Persentase penurunan jumlah konflik sosial dan gangguan keamanan	APBD	15.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Barat	-	2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Efektifnya peran FKDM dalam melaksanakan cegah dini dalam mengantisipasi terjadi konflik dan gangguan kantramtibmas					

Misi 1 Smart City: Mewujudkan Masyarakat demokratis berlandaskan hukum, layanan dan birokrasi yang efektif, inovatif, dan efisien

Mendukung Misi RPD: Melaksanakan reformasi birokrasi

Tujuan RPD: Terwujudnya reformasi birokrasi dan peningkatan daya saing daerah

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Peningkatan kapasitas SDM)	Pengembangan sistem pelayanan publik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat	APBK	Rp. 217.832.480,-	Kecamatan Meureubo		2024
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Optimalisasi peningkatan Pembangunan berbasis Aspirasi Masyarakat	Persentase gampong yang melaksanakan dana desa tepat waktu	APBK	Rp. 101.727.150,-	Kecamatan Meureubo		2024
		Program Penyelenggaraan	Penyelenggaraan koordinasi,	Persentase penyelenggaraan	APBK	Rp. 6.032.856,-	Kecamatan Meureubo		2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Pemerintahan dan Pelayanan Publik	sinkronisasi, harmonisasi dan keselarasan pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	pemerintahan kecamatan					

4.5.2 Smart Branding

Tabel 4.8 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Branding

Misi 1 Smart City: Mewujudkan pembangunan seluruh sektor yang berorientasi bisnis sekaligus meningkatkan nilai-nilai kedaerahan
Mendukung Misi RPD:
Tujuan RPD: Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata Meningkatkan investasi

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal.	Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal, Terlaksananya Koordinasi promosi Penanaman Modal, Jumlah promosi secara event Penanaman Modal,	APBD	252 juta	DPMPTSP		2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
				Jumlah promosi potensi investasi dalam bentuk digital					
		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal.	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu	Terlaksananya Pelayanan Perizinan, Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	APBD	111 juta	DPMPTSP		2024

Misi 1 Smart City: Mewujudkan pembangunan seluruh sektor yang berorientasi bisnis sekaligus meningkatkan nilai-nilai kedaerahan

Mendukung Misi RPD: Mewujudnya reformasi birokrasi dan peningkatan daya saing daerah

Tujuan RPD: Terwujudnya reformasi birokrasi dan peningkatan daya saing daerah

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Mempromosikan wisata di website dan media lainnya	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	APBD	30 juta	Disparpora, Diskominsa		2024
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran	Mempromosikan wisata dengan	Terlaksananya Fasilitasi	APBD	135 juta	Disparpora		2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota	mengikuti berbagai event daerah dan nasional	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri					
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Mempromosikan daerah melalui event olahraga	Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	APBD	217 juta	Disparpora		2024

4.5.3 Smart Economy

Tabel 4.9 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Economy

Misi 1 Smart City: Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek sosio ekonomi , sosiokultur, dan adaptif
Mendukung Misi RPD:
Tujuan RPD: Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang pertanian.

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	APBK	1.273.470.900	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	APBK	50.000.400	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		2024
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	APBK	3.493.327.200	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		2024
				Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	APBK	1.022.034.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		2024
				Jumlah Dam Parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	APBK	648.719.900	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		2024
				Jumlah Embung yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	APBK	324.360.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		2024
				Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang	APBK	675.016.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
				Dibangun, Direhabilitasi dan dipelihara					
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	APBK	101.122.250	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		2024
		Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	APBK	509.008.970	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		2024
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	APBK	168.990.500	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		2024
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	APBK	40.499.500	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		2024
				Jumlah Sekolah Lapang Kelompok tani tingkat yang terbentuk dan beroperasi	APBK	90.059.500	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		2024
		Program Penunjang Urusan Pemerintah	Meningkatkan Akuntabilitas	Persentase pemenuhan	APBK	2.920.608.302	Dinas Kelautan		2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja dan Pelayanan Publik	pelayanan administrasi dan operasional perkantoran			dan Perikanan		
				Jumlah Dokumen administrasi dan operasional perkantoran	APBK	30.625.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		2024
		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Penyusunan Kebijakan Pemberdayaan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Pengawasan Perikanan dan Kawasan Budidaya Ikan	APBK	10.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		2024
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	APBK	30.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		2024
				Bertambahnya Jumlah Sarana Penangkapan Ikan	APBK	605.999.999	Dinas Kelautan dan Perikanan		2024
				Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Petani Pembudidaya	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Perikanan Tangkap	APBK	80.800.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Perikanan Budidaya	APBK	560.649.999	Dinas Kelautan dan Perikanan		2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Mewujudkan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Hasil Perikanan	Bertambahnya Unit Pengelolaan Ikan (UPI)	APBK	30.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		2024
	Jumlah Kemitraan yang berhasil dibentuk			APBK	202.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		2024	
	Meningkatnya Persentase Produksi Ikan yang Dipasarkan Keluar Daerah					Dinas Kelautan dan Perikanan		2024	
		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pemberian Rekomendasi BBM Bersubsidi kepada Nelayan	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	APBK	10.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		2024

4.5.4 Smart Living

Tabel 4.10 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Living

Misi 1 Smart City: Mewujudkan Aceh Barat yang aman, damai, sehat, dan terdepan
Mendukung Misi RPD: Memantapkan Infrastruktur Layanan Dasar dan Pendukung Perekonomian Serta Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah
Tujuan RPD: Terwujudnya Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Merata

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Program pengelolaan dan	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung	Persentase drainase dalam kondisi baik/	Apbk	1 milyar	Perkim		2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		pengembangan sistem drainase	langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	pembuangan aliran air tidak tersumbat dan tidak terjadi genangan > 2 kali setahun 46,1 persen masukan dana yang					
		Program pengembangan permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota	Persentase kawasan permukiman dengan ketersediaan sarana dan prasana yang baik	Apbk dan doka	12 milyar	Perkim		2024
		Program kawasan permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Persentase rumah tidak layak huni	Apbk	2,9 milyar	Perkim		2024
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Urusan penyelenggaraan psu perumahan	Persentase sarana, prasarana dan utilitas umum (psu)	Apbk	1,5 milyar	Perkim		2024

Misi 1 Smart City: Mewujudkan Aceh Barat yang aman, damai, sehat, dan terdepan
Mendukung Misi RPD: mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas
Tujuan RP : terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Pengelolaan system penanganan gawat darurat terpadu	Terkelola dan terintegrasi dengan RS dalam satu system penanganan gawat darurat terpadu.	Adanya layanan PSC 119	APBD	170.000.000	Dinkes		2023
		Penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan	Pelayanan konsultasi jarak jauh antar fasilitas pelayanan kesehatan	Adanya pelayanan konsultasi jarak jauh antar fasyankes	APBD	500.000.000	Dinkes		2023

Misi 1 Smart City: Mewujudkan Aceh Barat yang aman, damai, sehat dan terdepan
Mendukung Misi RPD: Melaksanakan pembangunan dan pengendalian terhadap bangunan gedung
Tujuan RPD: Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Program Penataan Bangunan Gedung	Melaksanakan pembangunan dan pengendalian terhadap	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang	APBD	3.000.000.000	Dinas PUPR		2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
			bangunan gedung	dibangun, jumlah bangunan gedung pemerintah yang dipelihara dan jumlah bangunan gedung yang memiliki IMB					
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Melaksanakan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang dihasilkan, jumlah kegiatan pembinaan penataan ruang, jumlah kegiatan koordinasi penataan ruang dan jumlah kegiatan pemanfaatan penataan ruang	APBD	670.000.000	Dinas PUPR		2024

Misi 1 Smart City: Mewujudkan Aceh Barat yang aman, damai, sehat, dan terdepan
Mendukung Misi RPD: Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas sarana dan prasarana transportasi.
Tujuan RPD: Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana transportasi.

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Penyusunan Rencana Perluasan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	Pemanfaatan Digitalisasi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan menggunakan sistem kartu RFID	Jumlah uji KIR angkutan umum	APBD	171.700.000	Dinas Perhubungan		2024
		Meningkatkan Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas keselamatan jalan	APBD	40.400.000	Dinas Perhubungan		2024

4.5.5 Smart Society

Tabel 4.11 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Society

Misi 1 Smart City: Mewujudkan masyarakat yang edukatif , islami, berkualitas, maju dan berkeadilan.
Mendukung Misi RPD: Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan
Tujuan RPD: Terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Program pemberdayaan sosial	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Persentase ppks yang memperoleh bantuan sosial	Apbk	900.000.0000,-	Dinsos		2024
		Program rehabilitasi sosial	Penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Apbk	546.216.045,-	Dinsos		2024

Misi 1 Smart City: Mewujudkan masyarakat yang edukatif , islami, berkualitas, maju dan berkeadilan.
Mendukung Misi RPD: Menentukan kebijakan terkait peningkatan mutu pendidikan
Tujuan RPD: Terwujudnya Peningkatan Mutu Pendidikan

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Program penyelenggaraan majelis pendidikan aceh	Penyelenggaraan kebijakan pendidikan aceh	Terselenggarannya kebijakan pendidikan aceh	Apbk	76.967.792	Mpd aceh barat	-	2024
			Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran	Terselenggarannya Kurikulum	APBK	66.758.627	MPD Aceh Barat	-	2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
			Pendidikan Aceh	dan Pengajaran Pendidikan Aceh					
			Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh	Terselenggaranya pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	APBK	30.492.782	MPD Aceh Barat	-	2024
			Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Terselenggaranya Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	APBK	95.976.261	MPD Aceh Barat	-	2024

Misi 1 Smart City: Mewujudkan masyarakat yang **edukatif**, islami, berkualitas, maju dan berkeadilan.

Mendukung Misi RPD: Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas dan Berkeadilan

Tujuan RPD: Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkeadilan

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Program peningkatan kualitas keluarga	Kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan	Persentase keluarga yang sudah mendapat pelayanan	APBK	14,101,620	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan	-	2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
			gender (kg) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/ kota	konseling keluarga			keluarga berencana		
			Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pusat pembelajaran keluarga di Kabupaten	APBK	14,622,346	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	-	2024
		Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	DAK	3,931,998,540	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana	Puskesmas dan Bidan Desa	2024
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DAK	977,389,460	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Puskesmas dan Bidan Desa	2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
			di Daerah Kabupaten/Kota						

Misi 1 Smart City: Mewujudkan masyarakat yang **edukatif**, islami, berkualitas, maju dan berkeadilan.

Mendukung Misi RPD: Mewujudkan masyarakat yang **edukatif dan Maju**

Tujuan RPD: Terwujudnya masyarakat yang **edukatif dan Maju**

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Penataan desa	Penyelenggaraan penataan desa	Terfasilitasinya sarana dan prasarana desa	APBD	300.000.000	Dpmg		2024
		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	APBD	150.000.000	DPMG		2024
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	APBD	80.000.000	DPMG		2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
			(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Ada					
		Program administrasi pemerintahan desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	APBD	500.000.000	Dpmg		

Misi 1 Smart City: Mewujudkan masyarakat yang **edukatif**, islami, berkualitas, maju dan berkeadilan.

Mendukung Misi RPD: Menegakkan aturan Syariat Islam.

Tujuan RPD: Terwujudnya Kehidupan Sosial Politik dan Keagamaan yang Harmoni serta Menegakkan Aturan Syariat Islam.

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Patroli siaga ketentraman masyarakat dan ketertiban Umum	APBK	431.540.400	Satpol PP WH		2023
			Penanganan Atas	Persentase penyelesaian	APBK	50.003.900	Satpol PP WH		2023

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
			Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten					
			Pengawasan terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Persentase Penegakan Qanun Syariat Islam	APBK	212.723.100	Satpol PP WH		2023
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas Gampong yang aktif	APBK	128.220.300	Satpol PP WH		2023

Misi 5 Smart City: Mewujudkan masyarakat yang edukatif, islami, berkualitas, maju dan berkeadilan
Mendukung Misi RPJMD: Terwujudnya Peningkatan Kualitas pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat
Tujuan RPJMD: Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna perpustakaan	Peningkatan dan pengembangan peran dan fungsi lembaga perpustakaan melalui kebijakan daerah	Program Pembinaan Perpustakaan (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perpustakaan	Jumlah Dokumen Kebijakan (Qanun Perpustakaan, Master Plan Pengembangan Perpustakaan, Road Map Pengembangan Perpustakaan)	APBK	350.000.000,00	Dispusip, Bappeda	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Disdikbud, MPD, Dispusip Aceh	2024-2026

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
Sda.	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	Program Pembinaan Perpustakaan (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	1. Jumlah perpustakaan yang dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021); 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas dalam rangka penyelenggaraan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial (Perperpusnas 3/2023, Qanun Aceh ttg Perpustakaan).	APBK, DAK, DOKA, CSR		Dispusip	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Sekretariat Kecamatan, Dispusip Aceh, Perpusnas, Perusahaan di Wilayah Aceh Barat	2027-2031

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
Sda.	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Program Pembinaan Perpustakaan (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	APBK	50 juta / tahun	Dispusip	Dispusip Aceh	2024 dan seterusnya
Meningkatkan perlindungan naskah kuno dalam rangka melestarikan kekayaan informasi sejarah, ilmu pengetahuan, budaya dan bangsa.	Menyelamatkan nilai informasi dan fisik naskah kuno agar dapat digunakan dalam waktu yang lama	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno (Kempendagri 050-5889 Tahun 2021)	Perlindungan dan pelestarian naskah kuno (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	1. Persentase Naskah Kuno Yang Terawat; 2. Persentase Naskah Kuno Yang diakuisisi	APBK	50 juta / tahun	Dispusip	Dispusip, Sekretaris Kecamatan, Dispusip Aceh	2024 dan seterusnya

4.5.6 Smart Environment

Tabel 4.12 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Environment

Misi 6 Smart City: Mewujudkan daerah yang indah tetap sejuk serta berkelanjutan
Mendukung Misi RPJMD: Misi 5: Mewujudkan pelestarian adat istiadat dan lingkungan hidup
Tujuan RPJMD: Meningkatkan pelestarian istiadat dan lingkungan hidup

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kota yang ramah lingkungan dan berkesinambungan	Meningkatkan pelayanan terkait dengan tata kelola sumber daya air, tanah, ruang terbuka hijau dan udara yang berkelanjutan	Peningkatan sistem pengelolaan sampah perkotaan	Meningkatkan program Bank sampah <i>Waste Collecting Point (WCP)</i> di gampong, sekolah, perkantoran dan fasilitas umum	Pengurangan sampah hingga 10% sampai akhir 2022	APBD	500 juta	DLHK3		2022
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kota yang ramah lingkungan dan berkesinambungan	Meningkatkan pelayanan terkait dengan tata kelola sumber daya air, tanah, ruang terbuka hijau dan udara yang berkelanjutan	Layanan <i>Call Center</i> dan Media Sosial <i>responsive</i>	Menyediakan akses informasi dan pengaduan lingkungan secara digital	Layanan Pengaduan dengan skala Prioritas ditindaklanjuti	APBD	500 juta	Diskominfo, DLHK3		2022

V. Peta Jalan Pembangunan Smart City

Pada bagian ini akan menjelaskan peta jalan (*road map*) implementasi program pembangunan *Smart City* merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mewujudkan rencana induk (*master plan*) *Smart City* menjadi pelaksanaan pembangunan. Peta jalan (*road map*) pengembangan *Smart City* terbagi dalam 3 (tiga) fase yaitu:

1. Pengembangan Jangka Pendek. Perencanaan pengembangan *Smart City* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan periode yang dimulai dari 2021 sampai 2022.
2. Pengembangan Jangka Menengah. Perencanaan pembangunan *Smart City* dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, pada periode 2021 sampai tahun 2025.
3. Pengembangan Jangka Panjang. Perencanaan pembangunan *Smart City* dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan, pada periode 2021 sampai tahun 2031

Selanjutnya pada sub bab selanjutnya akan digambarkan secara detail strategi yang akan digunakan, program/inovasi, anggaran yang dibutuhkan, pelaksana kegiatan, dimensi yang termuat dalam *Smart City*, indikator keberhasilan dari program yang dijalankan dan target capaian untuk masing-masing periode yakni fase program jangka pendek, fase program jangka menengah dan fase program jangka panjang. Pada bagian akhir *road map* pengembangan *Smart City* Kabupaten Aceh Barat juga akan disebutkan program kegiatan Quick Win pada fase jangka pendek 2021-2022. Program *Quick Win* akan memuat semua sub dimensi pada dimensi *Smart City*.

5.1 Fase Program Jangka Pendek (Tahun 2021-2022)

Tabel 5 1 Fase Program Jangka Pendek (Tahun 2021-2022)

No	Strategi	Program/Inovasi	Anggaran (Rupiah)	Pelaksana/Mitra	Dimensi	Indikator Keberhasilan	Target Capaian	
							2021	2022
1	Integrasi layanan terutama <i>government to citizen</i> dan <i>government to business</i> serta juga <i>government to government</i> dan <i>government to employee</i> untuk meningkatkan kinerja ASN serta menuju ke Satu Data	Penelitian dan Pengkajian (naskah akademik qanun)	150.000.000	BAPPEDA, Diskominfo, Sekretariat	<i>Smart Governance</i>	Naskah akademik untuk penyusunan qanun satu data		√
2	Pengembangan aplikasi publik yang <i>user friendly</i>	Kegiatan Penelitian dan Pengkajian	100.000.000	Diskominfo	<i>Smart Governance</i>	Jumlah Masukan dan Usulan dari masyarakat dalam bentuk ikut serta lomaba/sayembara		√
3	Penerapan layanan dokumentasi dan informasi hukum	Penguatan Implementasi PPID di setiap OPD	200.000.000	Seluruh SKPD	<i>Smart Governance</i>	Jumlah SKPD yang mengimplementasikan PPID		√
4	Penerapan Rencana Induk SPBE Aceh Barat	Penerapan Rencana Induk SPBE Aceh Barat	400.000.000	Diskominfo, Sekretariat Daerah	<i>Smart Governance</i>	Indeks SPBE Meningkat		√
5	Pembangunan dan perawatan infrastruktur pendukung budaya, wisata islami dan kebencanaan	Renovasi dan Perawatan Hutan Aceh Barat	400.000.000	Dinas Pariwisata	<i>Smart Branding</i>	Tahun Renovasi dan Perawatan		√
6	Pembangunan Aceh Barat E-Commerce yang terintegrasi dengan <i>dashboard Aceh Barat</i>	Membuat aplikasi e-UMKM Aceh Barat	100.000.000	Diskominfo	<i>Smart Economy</i>	Tahun Pengembangan		√

No	Strategi	Program/Inovasi	Anggaran (Rupiah)	Pelaksana/Mitra	Dimensi	Indikator Keberhasilan	Target Capaian	
							2021	2022
	<i>Command Center (ACTT)</i>							
7	Pembuatan papan informasi nilai sejarah pada bangunan-bangunan kota pusaka <i>Aceh Barat</i>	Pengembangan <i>Display</i> Informasi Sejarah	300.000.000	Disdikbud	<i>Smart Economy</i>	Tahun Pengembangan		√
8	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pengelolaan air limbah yang layak	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	600.000.000	Dinas PUPR, DLHK3	<i>Smart Living</i>	Jumlah Kecamatan yang dibangun prasarana dan Sarana Air Limbah		√
9	Pengembangan program yang mengarah pada perbaikan kesehatan masyarakat	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Gampong Sehat	500.000.000	DINKES, Gampong, BPMG	<i>Smart Living</i>	Jumlah Gampong Sehat		√
10	Terpenuhinya kebutuhan kelompok berkebutuhan khusus di ruang publik	Pembuatan Peraturan Walikota tentang kebutuhan kelompok Disabilitas di ruang publik	20.000.000	Dinas Sosial, Bagian Hukum Sekretariat Daerah	<i>Smart Living</i>	Terbitnya Peraturan Walikota		√
11	Penguatan peran ulama dan masyarakat pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah	Peningkatan kegiatan Safari Dakwah Safari Subuh, Safari Ramadhan	100.000.000	MPU <i>Aceh Barat</i> , Dinas Syariah Islam	<i>Smart Society</i>	Jumlah kunjungan ke Mesjid		√
		Lomba membaca kitab Jawi/kuning	300.000.000	MPU Langsa, DSI, Kemenag Langsa	<i>Smart Society</i>	Jumlah peserta yang ikut serta		√

5.2 Fase Program Jangka Menengah (2021-2026)

Tabel 5.2 Fase Program Jangka Menengah (Tahun 2021-2025)

No	Strategi	Program/Inovasi	Anggaran (Rupiah)	Pelaksana/Mitra	Dimensi	Indikator Keberhasilan	Target Capaian				
							2021	2022	2023	2024	2025
1	Peningkatan kualitas layanan publik	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Masyarakat (SIPBM) – <i>pilot project</i>	400.000.000	Diskominfo	<i>Smart Governance</i>	Tahun Pengembangan					√
		Pembuatan Aplikasi kalender perencanaan penyusunan RPJMG dan RKPG di Gampong	400.000.000	Diskominfo	<i>Smart Governance</i>						√
2	Penerapan layanan yang memenuhi indek Keamanan Informasi (KAMI)	Penelitian dan Pengkajian	500.000.000	Diskominfo	<i>Smart Governance</i>	Tahun Penerapan				√	
3	Pengembangan informasi wisata digital	Aplikasi Wisata Digital <i>Aceh Barat</i>	400.000.000	Diskominfo	<i>Smart Branding</i>	Tahun Pengembangan				√	
4	Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Memberikan akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di pedesaan	800.000.000	Disperindagkop	<i>Smart Economy</i>	Jumlah UMKM yang mendapat akses pemodalan				√	
5	Membangun ekonomi industri yang berdaya	Pembuatan Peta Potensi Daerah	650.000.000	Diskominfo, Dinas Pariwisata, Bag Ekonomi Setda	<i>Smart Economy</i>	Tahun Pengembangan			√		

No	Strategi	Program/Inovasi	Anggaran (Rupiah)	Pelaksana/Mitra	Dimensi	Indikator Keberhasilan	Target Capaian				
							2021	2022	2023	2024	2025
	saing dengan memperkuat perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan daerah dan pengembangan usaha mikro.			<i>Aceh Barat</i> , Disperindagkop							
6	Membangun dan mengembangkan keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan, sebagai pendukung Smart City.	Membentuk Forum Industri Unggulan	550.000.000	Disperindagkop, Bag. Ekonomi Sekretariat Daerah <i>Aceh Barat</i> , SKPD terkait pengembangan kewirausahaan	<i>Smart Economy</i>	Banyaknya forum industri yang terbentuk			√		
		Membuat Pelatihan Industri Kecil Produk Unggulan	650.000.000	Disperindagkop, Bag. Ekonomi Sekretariat Daerah <i>Aceh Barat</i> , SKPD terkait pengembangan kewirausahaan	<i>Smart Economy</i>	Banyaknya peserta yang ikut serta				√	
7	Pengembangan rencana kawasan di masa depan dengan desain terpadu dan berwawasan lingkungan.	Kegiatan mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai Sosialisasi Dampak Penyedotan air tanah, galian C	1.200.000.000	Dinas PUPR, DLHK3, Kecamatan, BPPD	<i>Smart Living</i>	Jumlah Panjang Tanggul/Sungai Yang Dibangun				√	
8	Pengembangan sistem	Aplikasi Posyandu Terintegrasi	600.000.000	Dinas Kesehatan, Gampong, BPMG	<i>Smart Living</i>	Tahun Pengembangan			√		

No	Strategi	Program/Inovasi	Anggaran (Rupiah)	Pelaksana/Mitra	Dimensi	Indikator Keberhasilan	Target Capaian				
							2021	2022	2023	2024	2025
	Pelayanan kesehatan terpadu dari puskesmas, bidan, rumah sakit dan dokter praktek yang terintegrasi dan ramah anak.										
9	Terpenuhinya kebutuhan kelompok berkebutuhan khusus di ruang publik	Program Penyediaan Akses untuk Penyandang Disabilitas Oleh SKPD	1.000.000.000	Dinas Sosial, Dinas PUPR, SKPD terkait lainnya	<i>Smart Living</i>	Jumlah SKPD yang menyediakan fasilitas akses untuk penyandang Disabilitas				√	
10	Pengembangan sistem transportasi umum yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan transportasi <i>non-motorized</i>	Penyediaan CCTV	800.000.000	Dinas Perhubungan	<i>Smart Living</i>	Tahun Pengembangan				√	
11	Penguatan peran ulama dan masyarakat pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah	Pembuatan modul standar pembinaan Pra Nikah	400.000.000	DP3AP2KB, Dinkes, DSI, MPU Aceh Barat, Kemenag Aceh Barat	<i>Smart Living</i>	Tahun Pengembangan			√		

No	Strategi	Program/Inovasi	Anggaran (Rupiah)	Pelaksana/Mitra	Dimensi	Indikator Keberhasilan	Target Capaian				
							2021	2022	2023	2024	2025
12	Penguatan peran ulama dan masyarakat pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah	Peningkatan kegiatan pencegahan pendangkalan aqidah	400.000.000	MPU, DSI dan Dayah, Kesbangpol (Forum Kerukunan Umat Beragama - FKUB)	<i>Smart Society</i>	Jumlah Kegiatan			√		

5.3 Fase Program Jangka Panjang (2021-2031)

Tabel 5.3 Fase Program Jangka Panjang (Tahun 2021-2031)

No	Strategi	Program/Inovasi	Anggaran (Rupiah)	Pelaksana/Mitra	Dimensi	Indikator Keberhasilan	Target Capaian
1	Pengoptimalan kinerja pengawasan internal	Penerapan secara menyeluruh tunjangan kinerja yang didukung dengan sistem e-kinerja	800.000.000	Inspektorat, Sekretriari Daerah	<i>Smart Governance</i>	Tahun Pengembangan	2021-2031
2	Pelayanan terpadu 1 (satu) atap yang melibatkan semua SKPD, Kepolisian dan <i>stakeholder</i>	Aplikasi Pencatatan Kelahiran dan Pembuatan Kartu Identitas Anak	700.000.000	Seluruh SKPD	<i>Smart Governance</i>	Tahun Pengembangan	2021-2031
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata serta meningkatkan daya saing industri pariwisata	Program eko-Wisata Ilmu kopi (<i>Augmented Virtual Reality</i>)	600.000.000	Diskominfo, Universitas Samudera Langsa	<i>Smart Branding</i>	Tahun Pengembangan	2021-2031
4	Pengembangan taman kota yang nyaman, aman dan layak bagi anak, pemuda dan lansia.	Pengembangan Taman Kota Ramah Anak	1.200.000.000	Dinas PUPR, Dinas DLHKP, Disporapar, DP3AP2KB	<i>Smart Economy</i>	Tahun Pengembangan	2021-2031
5	Meningkatkan iklim Investasi.	Membentuk forum Investor Fasilitasi untuk pameran produk	1.000.000.000	Disperindagkop	<i>Smart Economy</i>		2021-2031
6	Pengendalian pemanfaatan ruang melalui penegasan aturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penegakan sanksi	Kegiatan Pembangunan Jalan	20.000.000.000	Dinas PUPR, Bagian Administrasi Pembangunan, Kecamatan	<i>Smart Living</i>	Jumlah Panjang Jalan Yang Dilakukan Peningkatan (Per Tahun)	2021-2031

	terhadap pelanggaran tata ruang.						
7	Pengembangan sistem transportasi umum yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan transportasi <i>non-motorized</i>	Pembuatan Sistem Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.000.000.000	Dinas Perhubungan, Pengguna Angkutan	<i>Smart Living</i>	Tahun Pengembangan	2021-2031
8	Peningkatan Pembangunan Zona Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Pembangunan Taman Layak Anak Lalu Lintas	2.000.000.000	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR	<i>Smart Living</i>	Tahun Pembangunan	2021-2031

5.4 Quick Win

Dalam jangka pendek di tahun 2021-2022, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menetapkan program **Quick Respons Indonesia Standar (QRIS) pada Objek Wisata Aceh Barat** sebagai kegiatan *Quick Win* pembangunan *Smart City*. Program ini memiliki dampak secara langsung kepada transaksi keuangan objek wisata Aceh Barat yang masuk ke dalam 6 (enam) dimensi *Smart City Aceh Barat*.

Tabel 5.4 Kegiatan Quick Win Kabupaten Aceh Barat

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
Nama Singkat Inovasi	Quick Respons Indonesia Standar (QRIS) pada Objek Wisata Aceh Barat
Penjelasan Singkat	Penggunaan QRIS sebagai transaksi non-tunai
Status Saat ini	Sudah disosialisasikan masyarakat baik pelaku wisata serta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Manfaat dari inovasi	Layanan menjadi lebih efisien, mudah dan aman
Keunikan	<ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan semua dimensi <i>Smart City</i> Kabupaten Aceh Barat - Mengintegrasikan seluruh layanan informasi yang akurat secara <i>real time</i>
Mitra	Masyarakat, Relawan, Komunitas Pelaku Wisata
Potensi untuk Pengembangan Lebih Lanjut	Integrasi semua layanan yang berhubungan dengan data dan informasi baik dari pemerintah, swasta serta melibatkan <i>stakeholder</i> lainnya dan penerapan teknologi QRIS pada hotel dan restaurant Kabupaten Aceh Barat
Strategi Menjaga Keberlangsungan Inovasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Dewan <i>Smart City</i> dan Tim Pelaksana 2. Melakukan <i>review</i> secara rutin membahas program dengan Dewan <i>Smart City</i> 3. Koordinasi dan menyamakan persepsi dengan <i>Stakeholder</i> 4. Pengembangan layanan dan tools berdasarkan hasil <i>review</i> 5. Melakukan sosialisasi dan launching program kepada masyarakat
Sumber Daya yang Digunakan	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Smart City - Tim Pelaksana Smart City - Masyarakat/Relawan - Admin/Operator Layanan - Stakeholder
Analisis Resiko	<ul style="list-style-type: none"> - Program membutuhkan komitmen bersama antara seluruh <i>stakeholders</i> sehingga perlu diadakan evaluasi secara rutin untuk menyamakan persepsi - Membutuhkan tenaga operator yang banyak dan khusus menangani layanan-layanan

Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> - Program membutuhkan komitmen bersama antara seluruh stakeholders sehingga perlu diadakan evaluasi secara rutin untuk menyamakan persepsi - Membutuhkan tenaga operator yang banyak dan khusus menangani layanan-layanan
Dimensi Smart City dan OPD	<p>Dimensi Smart City</p> <p><i>Smart Governance</i> Memberikan informasi publik secara terbuka dan transparansi</p> <p><i>Smart Branding</i> Memberikan kemudahan kebutuhan informasi investasi bagi para investor</p> <p><i>Smart Economy</i> Membangun suasana industri yang kompetitif dengan menyajikan informasi produk unggulan daerah</p> <p><i>Smart Living</i> Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat melalui pesan informasi yang aktual yang disampaikan <i>via Langsa Madani Information Board</i></p> <p><i>Smart Society</i> Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut serta peduli dengan lingkungannya masing-masing</p> <p><i>Smart Environment</i> Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat untuk menjaga lingkungan, memahami tata kelola limbah dan energi terbarukan</p> <p>SKPD Sekretariat Daerah Diskominfo Dinas Pariwisata</p> <p>Stakeholder Pengusaha Objek Wisata Forum Kolaborasi Komunitas BUMN Media Masa</p>
Layanan yang Berkaitan	Laman web https://acehtengahkab.go.id

VI. PENUTUP

Kabupaten *Aceh Barat* telah mulai melakukan usaha menuju *Smart City* yang sudah disosialisasikan oleh Kementerian Kominfo guna melakukan akselerasi pembangunan dengan menggunakan konsep *Smart City* atau Kota Pintar. Hal ini dibuktikan dengan dimasukkan istilah smart city dalam visi misi Pemerintah Kabupaten *Aceh Barat*.

Dengan mempertimbangkan segala potensi yang dimiliki Kabupaten *Aceh Barat*, baik itu dari segi infrastruktur serta SDM, pemerintah Kabupaten *Aceh Barat* dan tim terkait telah mengembangkan visi, strategi dan prioritas menuju *Smart City Aceh Barat*. Pembangunan prioritas *Smart City* Kabupaten *Aceh Barat* meliputi enam dimensi, yaitu tata kelola pemerintahan (*governance*), penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah (*branding*), tata kelola perekonomian (*economy*), peningkatan kelayakan taraf hidup masyarakat (*living*), ekosistem sosial masyarakat (*social*), serta pengelolaan lingkungan (*environment*).

Program pembangunan *Smart City* Kabupaten *Aceh Barat* harus tetap sejalan dengan kaidah syari'ah Islam, mengingat nilai-nilai Islam merupakan keluhuran yang dijunjung tinggi di Kabupaten *Aceh Barat* sejak lama. Besar harapan, segala inovasi yang dirancang akan menjadi solusi yang signifikan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Sehingga pemerintah dapat memberikan layanan kepada publik dengan menyediakan lingkungan tempat tinggal yang berkelanjutan, layak serta meningkatkan daya saing daerah. Dalam mewujudkannya tujuan dari *Smart City* Kabupaten *Aceh Barat*, pemerintah Kabupaten *Aceh Barat* tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kerja sama antar sektor, baik itu dari pihak pemerintah, masyarakat maupun swasta. Diperlukan penyesuaian persepsi dan sinkronisasi untuk mewujudkan kepentingan bersama. Dengan demikian pengembangan *Smart City* bisa menjadi efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif. Berbagai akselerasi pembangunan merupakan komitmen bersama seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten *Aceh Barat* sesuai dengan visi misi *Smart City Aceh Barat*.

Proses pengembangan menuju *Smart City* masih sangat panjang. Kepala daerah, Dewan *Smart City* dan tim teknis berkomitmen untuk mewujudkan rencana induk *Smart City* dalam implementasi, maupun monitoring dan evaluasi sehingga akan berjalan dengan sistematis dan berkelanjutan. Pembangunan *Smart City* merupakan usaha yang kontinu dan bertahap, maka dalam pengembangannya akan secara dinamis disesuaikan dengan

perkembangan teknologi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi setiap tahun terhadap rancangan yang telah dibuat dan perubahan tersebut akan dikuatkan dengan Peraturan Bupati.